

Buku Manfaat Dana Desa

by Mukhlis Mukhlis

Submission date: 04-Jun-2021 08:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 1600388898

File name: Buku_Manfaat_Dana_Desa_Sumatera_Selatan_2.pdf (616.82K)

Word count: 17784

Character count: 102636



Data & Informasi

Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan



PUSAT DATA DAN INFORMASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

**Data dan Informasi
Manfaat Dana Desa
di Provinsi Sumatera Selatan**

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan



Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Bekerja Sama dengan
Universitas Sriwijaya

Jakarta 2018

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi. Jakarta, 2018.

+hlm ; 14,5 x 21 cm
ISBN 978-623-7129-40-0

Judul:

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Penyusun:

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D, Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr, Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si, Dr. Azwardi, S.E. M.Si, Mukhtaruddin, S.E. M.Si, Ak, CA, Dr. Sukanto, S.E. M.Si, Mukhlis, S.E., M.Si, Dr. Kemas Muhammad Husni Thamrin, SE, MM, Abdul Bashir S.E., M.Si, Umi Kalsum, S.E., M.Si, Ak, CA, Muhammad Farhan, Patmawati, SE, M.Si, Ak, CA, Feny Marissa, S.E., M.Si, Dirta Pratama Atiyatna, S.E., M.Si, Ichsan Hamidi, S.H.I., M.Si.,

Copyright @ 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Universitas Sriwijaya

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan.

Upaya pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dengan penetapan kebijakan Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN. Kebijakan Dana Desa tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sehingga memiliki status hukum yang lebih kuat serta dapat memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan bagi pemerintah desa.

Sejalan dengan itu, adanya kebijakan Dana Desa tersebut diharapkan pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga akan menjadikan sebuah desa

berkembang dalam segala aspek, terutama aspek infrastruktur yang merupakan kebutuhan masyarakat perdesaan. Kesenjangan pembangunan yang terjadi antara daerah perdesaan dan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat perdesaan menjadi semakin tidak mandiri sehingga menyebabkan adanya ketergantungan dari daerah perdesaan terhadap perkotaan.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam konteks agregat mengamanatkan secara mandiri agar desa dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan atas hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa dan juga mendapatkan sumber pendapatan. Sementara dari sisi masyarakatnya, berhak memperoleh informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Dana Desa diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan tidak jauh melebar. Untuk itu, diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan

masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan desa mandiri. Secara umum, tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), tingkat perkembangan desa dikelompokkan ke dalam 5 kategori, di antaranya (1) Sangat tertinggal; (2) Tertinggal; (3) Berkembang; (4) Maju; dan (5) Mandiri. Pada tahun 2018, telah dilakukan survei mengenai Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, terlihat adanya perubahan status desa, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1 Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengetahui secara spesifik perubahan status desa tersebut serta dinamika perubahan yang terjadi berdasarkan dimensi pada IDM di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1.Jumlah Desa di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Status Perkembangan Desa menurut IDM, Tahun 2015 dan 2018

No	Status Desa	Jumlah		Pertumbuhan (%)
		2015	2018	
1	Sangat Tertinggal	290	181	-37,93
2	Tertinggal	1.990	1.639	-17,59
3	Berkembang	553	981	77,40
4	Maju	19	51	168,42
5	Mandiri	-	1	-
Total		2,852	2,852	2,852

Sumber:Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2018

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan status desa di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2015 jumlah desa yang berstatus sangat tertinggal sebanyak 290 desa, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 180 desa atau bertumbuh negatif sebesar -37,93%. Demikian juga desa yang memiliki status tertinggal, pada tahun 2015 sebanyak 1.990 desa dan menurun pada tahun 2018 berjumlah 1.640 desa atau tumbuh negatif sebesar -17,59%. Penurunan jumlah status desa sangat tertinggal dan tertinggal pada tahun 2018 diperkirakan bahwa program Dana Desa telah memberikan manfaat dalam mendorong pembangunan desa.

Sementara itu, untuk jumlah desa dengan status berkembang dan maju mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun

2018. Peningkatan jumlah desa dengan status berkembang sebanyak 981 desa atau sebesar tumbuh sebesar 77,0% dari tahun 2015 sedangkan jumlah desa status maju sebanyak 51 desa atau tumbuh sebesar 168,42% dari tahun 2015. Jumlah desa dengan status mandiri sebanyak 1 desa pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2015 jumlah desa dengan status mandiri belum ada. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa program Dana Desa oleh pemerintah diperkirakan telah memberikan manfaat bagi sebagian desa di Provinsi Sumatera Selatan.

Sejak tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi telah memfasilitasi pembangunan desa di setiap Provinsi melalui stimulasi Dana Desa. Berbagai jenis intervensi pembangunan desa telah dilakukan. Namun, data dan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa belum tersedia, terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM. Selain itu, desa juga diharapkan dapat melakukan inovasi dalam pemanfaatan Dana Desa, sebagai upaya dalam rangka mendorong desa agar lebih efektif dalam penggunaannya sebagai investasi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Terjadinya Inovasi Desa dapat dilatarbelakangi oleh adanya potensi maupun permasalahan desa. Oleh karena itu, diperlukan informasi Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa. Data dan Informasi ini diperlukan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan atau program inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Dana Desa khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi manfaat Dana Desa dalam upaya pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan penyusunan laporan ini di antaranya:

- (1) Menganalisis data dan informasi dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM);
- (2) Menganalisis data dan Informasi pemanfaatan Dana Desa terkait dengan status perkembangan desa, peningkatan kesejahteraan, dan Lembaga Ekonomi Desa;
- (3) Menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan pemanfaatan Dana Desa; dan
- (4) Menyusun rekomendasi penggunaan inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Dana Desa.

Adapun hasil (luaran) dari penelitian ini tersedianya data dan informasi tentang manfaat Dana Desa dalam bentuk Laporan Penelitian dan *Executive Summary*.

C. Manfaat

Secara umum, penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Selatan serta masyarakat luas. Dengan demikian, manfaat kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun rekomendasi kebijakan atau program inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Dana Desa khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, manfaat lain dari hasil kajian ini di antaranya:

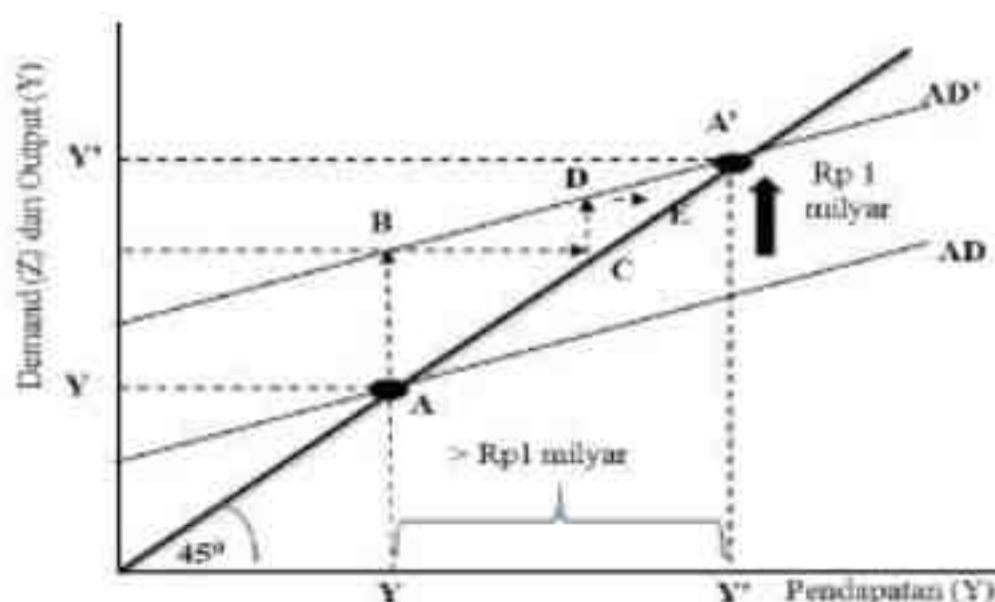
- (1) Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan terkait dengan Program Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa dalam rangka menjadi desa mandiri.
- (2) Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data mengenai kondisi potensi, hambatan, peluang, dan ancaman dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa.
- (3) Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam rangka pemanfaatan Dana Desa secara efisien dan efektif.

D. Tinjauan Pustaka

D.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Peacock dan Wiseman mengemukakan peran pengeluaran pemerintah bagi pembangunan ekonomi. Teori ini bertolak dari adanya keinginan pemerintah yang berupaya untuk menambah pengeluarannya namun di sisi lain dijumpai masyarakat yang bersikap tidak suka membayar pajak karena akan menambah beban bagi mereka atau selalu terjadi *trade-off* antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi pengeluaran pemerintah akan sangat tergantung dari besar kecilnya penerimaan negara dan salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Semakin besar pajak yang terkumpul maka semakin besar penerimaan negara. Pengeluaran pemerintah akan menciptakan efek penganda bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks yang lebih sempit, pengeluaran pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pendapatan (Gambar 1.1)



Gambar 1.1. *Multiplier Effect* dari Belanja Pemerintah

Sumber: Blancard 2011

Sejak otonomi daerah, salah satu pengeluaran pemerintah pusat adalah dana transfer pusat ke daerah dan desa, sebagai wujud dana transfer pemerintah pusat ke desa adalah Dana Desa.

D.2. Dana Desa

Desa di Indonesia sebelum adanya reformasi selalu dijadikan objek pembangunan sehingga terjadi bias perkotaan dalam pembangunan. Padahal desa sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah menyadari sepenuh bahwa kemajuan bangsa perlu diperkuat oleh pembangunan dari perdesaan. Sebagai wujud perhatian

pemerintah maka lahirlah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang tersebut mengharuskan adanya Dana Desa, penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang besaran atau persentase belanja desa dalam APBDesa. Merujuk pada undang-undang tentang desa tersebut maka tujuan diberikan Dana Desa adalah: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Permendes Nomor 19 Tahun 2017, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besar kecilnya Dana Desa akan sangat tergantung dari indikator yang menjadi dasar perhitungan. Indikator yang dipakai dalam menentukan Dana Desa mencakup: 1) jumlah penduduk, 2) angka kemiskinan, (3) luas wilayah, dan 4) tingkat kesulitan geografis. Proporsi dan bobot formula Dana Desa didasarkan pada 1) alokasi dasar sebesar 90%, 2) alokasi formula sebesar 10% dengan komposisi: a) jumlah penduduk desa (25%), b) angka kemiskinan desa (35%), c) luas wilayah desa (10%) dan d) tingkat kesulitan geografis (30%).

Seiring waktu, pemberian Dana Desa dari pusat ke daerah terus mengalami perubahan terutama prioritas sasaran Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penggunaan Dana Desa tahun 2016 merujuk pada Permendes PDT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Permendes tersebut menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana tahun 2017 berpedoman pada Permendes PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa di tahun 2017 menekankan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, prioritas penggunaan Dana Desa merujuk pada Permendes 19 Tahun 2017 tentang prioritas Dana Desa tahun 2018, dalam Bab 3 pasal 4 dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa mencakup lima hal yaitu:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama,

embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan kepentingan prioritas, dengan desa yang lebih mendahulukan mendesak, lebih langsung dengan dan berhubungan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan **hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa**;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan

- f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Ketentuan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada:

- 1) Kemanfaatan, artinya penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendesak dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- 2) Partisipasi masyarakat, pelibatan masyarakat menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Tanpa adanya dukungan dari sebagian besar masyarakat program kegiatan sulit untuk dijalankan.
- 3) Keberlanjutan, memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 4) Kepastian adanya pengawasan artinya masyarakat desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kata kuncinya adalah kegiatan yang dilakukan harus transparan dan akuntabel.

- 5) Sumber daya dan tipologi desa, hal ini bermakna setiap daerah memiliki keunikan atau adanya heterogenitas wilayah. Dinamika wilayah yang cepat berubah harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas kegiatan.

Dana Desa diharapkan tidak saja diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur namun juga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci dari terbentuknya BUMDesa yaitu sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembentukan BUMDesa tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha masyarakat (*economic community*) yang telah ada.

Secara lugas isi pasal yang terkandung Permendes PDT tersebut menjelaskan bahwa BUMDesa bertujuan:

- Meningkatkan perekonomian desa;
- Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;

- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Implementasi kegiatan Dana Desa saat ini diarahkan untuk dilaksanakan dengan cara swakelola. Konsep swakelola ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa yang tergolong dalam kelompok masyarakat miskin. Salah satu program swakelola adalah *cash for work* yang bertujuan mencegah terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakages*). Dana Desa diharapkan tidak mengalir ke luar desa sehingga dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi pembangunan desa. Bentuk kegiatan dalam *cash for work* misalnya pembangunan sarana dan prasarana.

D.3. Inovasi Desa

Pengelolaan Dana Desa tidak saja diarahkan untuk pembangunan fisik semata namun diarahkan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari adanya

inovasi. Inovasi diartikan sebagai proses atau hasil kreativitas pembaruan/perbaikan yang membawa (memberikan) kegunaan/kemanfaatan nyata (komersialisasi/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya).

Dasar kebijakan perlunya inovasi berpedoman Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Setiap desa diharapkan mampu berinovasi agar Dana Desa mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat. Inovasi yang dilakukan di desa harus efisien, efektif, komersial dan adanya cipta nilai (*value added*). Inovasi yang tinggi diyakini akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan melalui keunggulan kompetitif (diferensiasi): berbagi pengetahuan dan kompetensi. Inovasi juga berkontribusi pada penurunan biaya melalui keunggulan biaya: berbagi sumber daya dan berbagi kerja (Gambar 1.2)



Gambar 1.2 Kontribusi Inovasi terhadap Keunggulan Daya Saing Ekonomi Lokal

Sumber: Sulastri, 2018

Inovasi tercipta dari bagaimana mengelola pengetahuan agar memunculkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Dalam proses penciptaan inovasi diperlukan identifikasi faktor internal maupun eksternal. Pengelolaan pengetahuan (ide) ini penting agar dapat melihat kebutuhan (permintaan) desa atau pun perlu dikonsultasikan dengan penyedia jasa layanan teknis (tenaga ahli, LSM, Perguruan Tinggi). Ketiga komponen tersebut saling terkait. Sinergitas unsur-unsur tersebut akan mampu menciptakan pasar inovasi (Gambar 1.3)

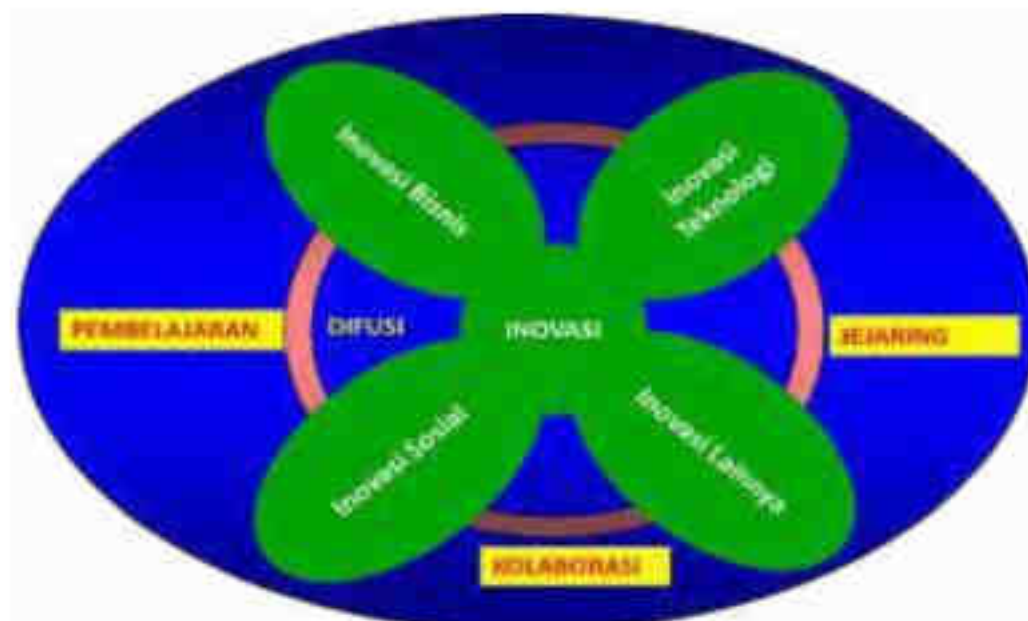


Gambar 1.3. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

Sumber: Sulastri, 2018

Inovasi yang akan dilakukan dapat berupa inovasi bisnis, inovasi teknologi, inovasi sosial maupun inovasi yang lainnya, artinya inovasi yang akan dilakukan luas cakupannya. Proses

pembelajaran, *network*, kesediaan untuk kolaborasi mampu menciptakan inovasi. Konteks pengelolaan Dana Desa, para aparatur pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa lainnya (kerja sama) untuk melakukan Inovasi Desa. Selain itu, pemerintah desa dapat memanfaatkan jejaring dalam mendorong terciptanya Inovasi Desa (Gambar 1.4)



Gambar 1.4. Jenis Inovasi Dan Keterkaitannya

Sumber: Sulastri, 2018

E. Metode

E.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian eksplanatori yang menggabungkan dua jenis penelitian sekaligus antara lain penelitian evaluasi dan kebijakan. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Sementara itu, penelitian kebijakan merupakan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambil keputusan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pengambil keputusan.

Selain itu, untuk melihat implementasi program Inovasi Desa memanfaatkan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan status perkembangan desa, pengurangan kesenjangan indeks gini ratio, maka digunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) berupa survei kepada masyarakat pemanfaat Dana Desa, dan metode kualitatif eksplantif untuk menggali proses dan alasan penggunaan Dana Desa, terutama untuk pemanfaatan Inovasi Desa.

E.2. Metode Pengambilan Data

Data yang dihimpun meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri atas penggunaan Dana Desa, APBDes, Data Laporan BUMDesa, data Keluarga Sejahtera (dari BKKBN)

serta perkembangan IDM. Sementara itu, data primer meliputi penyebab perubahan nilai IDM, kontribusi Dana Desa bagi perubahan nilai IDM, manfaat Dana Desa bagi masyarakat, pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan peningkatan kesejahteraan serta faktor pendorong dan kendala pemanfaatan Dana Desa.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan (perangkat desa, pendamping desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, pengelola Lembaga Ekonomi Desa, dan tokoh masyarakat, keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (miskin), dan keluarga Sejahtera II dan Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus (tidak miskin) serta wawancara dengan responden. Responden ditentukan sebanyak 20 orang/desa yang ditentukan secara proporsional dari keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I, serta Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus.

Adapun data yang dihimpun melalui wawancara tersebut terdiri dari informasi tentang pemanfaatan Dana Desa dan Inovasi Desa. Sementara itu, data yang dihimpun melalui wawancara dengan responden rumah tangga terdiri dari informasi manfaat Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Wawancara dengan informan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara dengan menggunakan kuesioner.

Sampel dalam penelitian dipilih dengan rata-rata IDM (2018) Kabupaten yang mendekati rata-rata IDM (2018) Provinsi. Berdasarkan hasil inventarisasi Kabupaten Ogan Komering Ilir

(OKI) terpilih menjadi sampel di Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan desa di Kabupaten OKI dipilih 5 desa dengan ketentuan sebagai berikut:

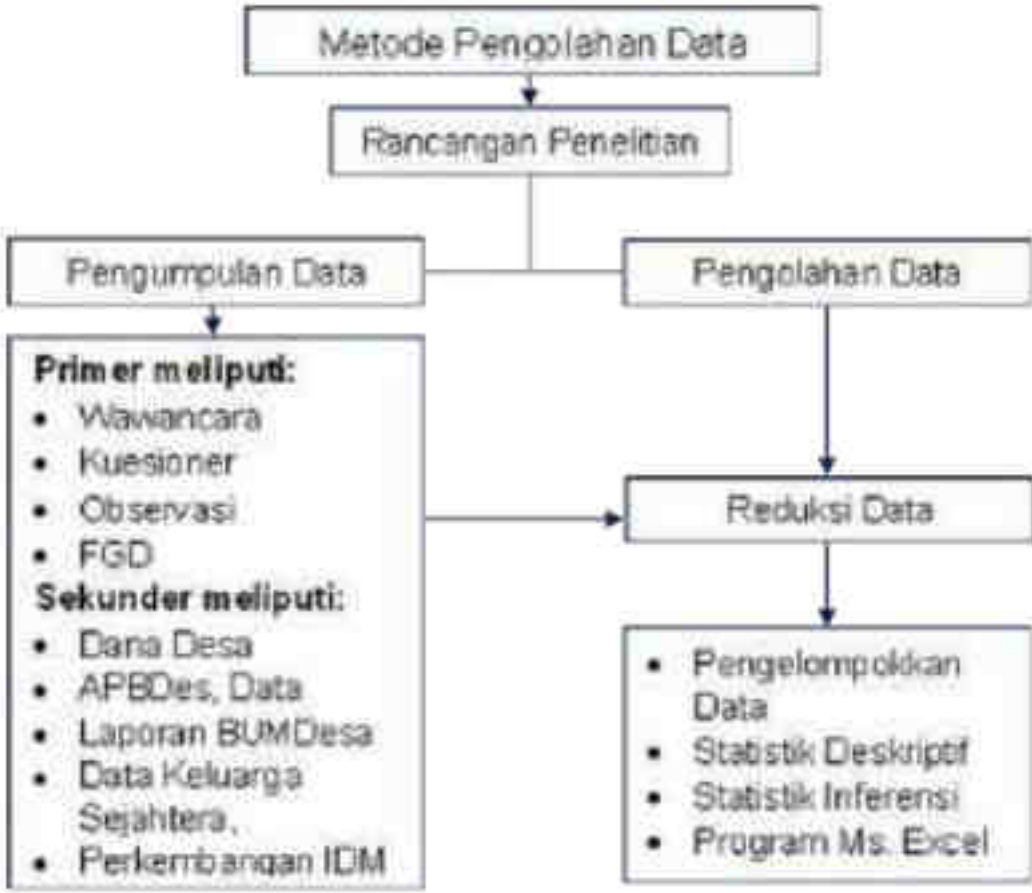
- (1) Satu desa sangat tertinggal yang memiliki nilai IDM mendekati rata-rata IDM desa sangat tertinggal di provinsi.
- (2) Satu desa tertinggal yang memiliki nilai IDM paling mendekati rata-rata IDM desa tertinggal di provinsi.
- (3) Satu desa berkembang yang memiliki nilai IDM paling mendekati rata-rata IDM desa berkembang di provinsi.
- (4) Satu desa maju yang memiliki nilai IDM paling mendekati rata-rata IDM desa maju di provinsi.
- (5) Satu desa mandiri yang nilai IDM paling mendekati rata-rata IDM desa mandiri di provinsi

Berdasarkan kriteria tersebut, dari identifikasi dan pemetaan *locus* desa, maka lima desa yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian yaitu: (1) Desa Pulau Gemantung Darat (status sangat tertinggal); (2) Desa Lubuk Ketepeng (status tertinggal); (3) Desa Sedyo Mulyo (status berkembang); (4) Muara Burnai dua (status maju); dan (5) Desa Tugumulyo (status mandiri).

E.3 Metode Pengolahan Data

Penelitian ini diawali dengan menyusun rancangan penelitian, selanjutnya dalam melakukan inventarisasi, seperti data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan reduksi

data, pengategorian data dalam tema-tema pada matrik yang telah ditentukan dan interpretasi data.



Gambar 1.5. Metode Pengolahan Data

E.4. Metode Analisis Pelaksanaan Inovasi (*Technoware, Humanware, Orgaware, Infoware*)

Metode analisis pelaksanaan inovasi dalam penelitian ini terdiri atas empat komponen teknologi yaitu: (1) *Technoware*, (2) *Humanware*, (3) *Orgaware*, dan (4) *Infoware*. Keempat

komponen teknologi tersebut berinteraksi secara dinamik yang menentukan tingkat kemampuan penguasaan teknologi.

- (1) *Technoware* merupakan perangkat analisis yang mencakup fasilitas fisik seperti komputer dan peralatan lainnya yang dapat membantu dalam menyelesaikan kegiatan penelitian ini dengan lebih mudah serta mengontrol jalannya kegiatan penelitian ini.
- (2) *Humanware* merupakan kemampuan individu dan kelompok (Tim Penelitian), seperti keterampilan, pengetahuan, keahlian dan kreativitas yang berperan untuk mewujudkan kegunaan sumber daya alam dan sumber daya teknologi yang tersedia untuk tujuan produktif.
- (3) *Orgaware* merupakan kemampuan suatu lembaga atau institusi yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan penelitian ini untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan seperti melakukan koordinasi pada jaringan kerja (*group*), *linkages*, dan teknik-teknik pengorganisasian lainnya.
- (4) *Infoware* merupakan kumpulan dokumen fakta seperti sekumpulan data, laporan, *blue print*, hasil survei, observasi dan pengamatan yang berfungsi untuk mempercepat proses kegiatan penelitian ini sehingga menghemat sumberdaya dan waktu.

E.5. Metode Analisis Data

Kajian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan

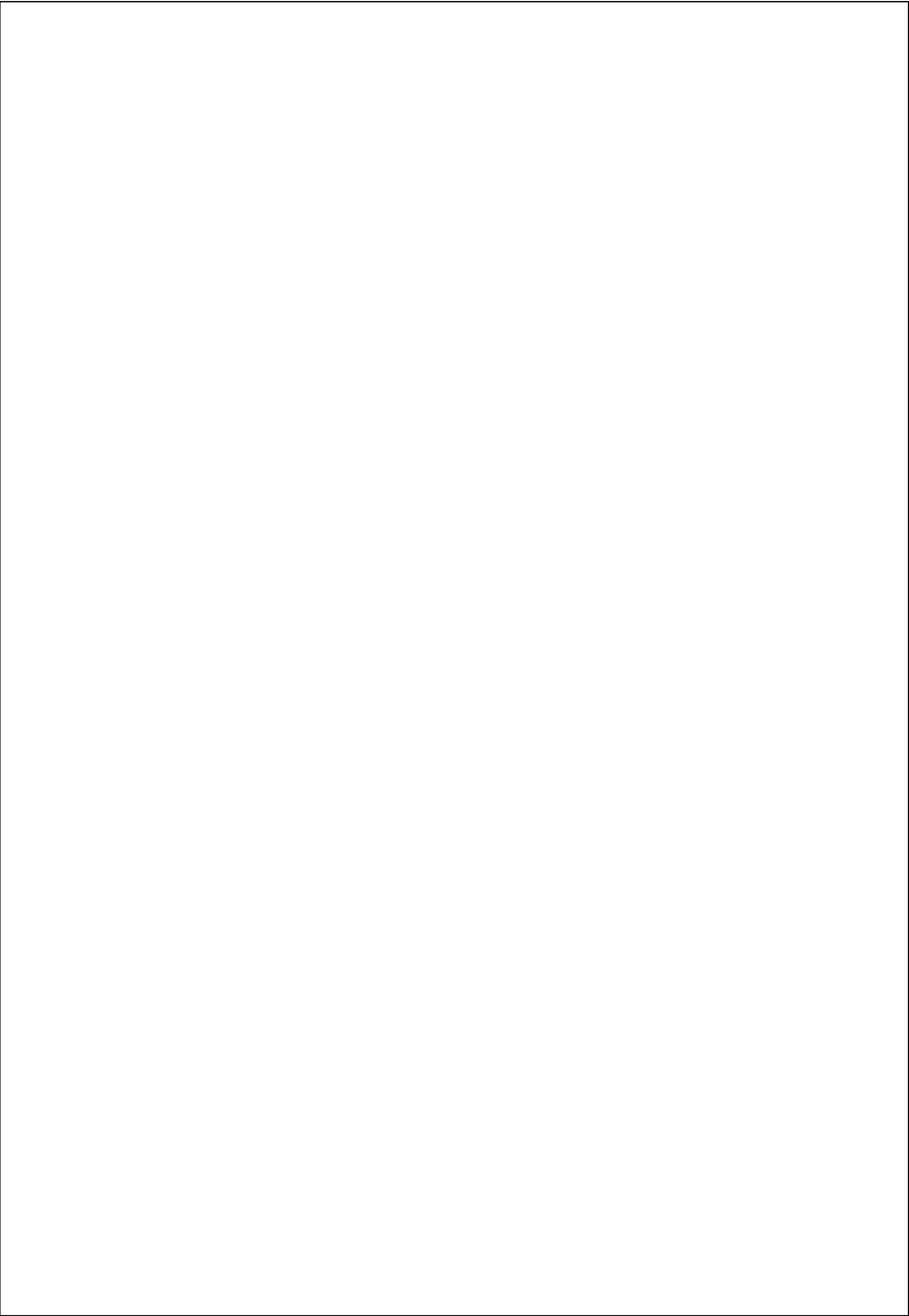
kuantitatif untuk mendeskripsikan mengapa terwujud kondisi existing perkembangan desa menurut IDM, serta kebutuhan Inovasi Desa bagi desa yang mengalami penurunan status dan atau desa tidak mengalami perubahan status.

Pendekatan kualitatif untuk menjelaskan proses dan dampak pemanfaatan Dana Desa terkait dengan status perkembangan desa dalam IDM, bidang pembangunan desa dan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta praktek Inovasi Desa yang diterapkan pada desa yang mengalami kenaikan status. Adapun analisis data kualitatif deskriptif yang akan dilakukan di antaranya:

- (1) Perkembangan status desa (IDM) diolah secara tabulasi dengan membandingkan status desa tahun 2015 dengan tahun 2018. Data dideskripsikan melalui rata-rata berdasarkan nilai masing-masing status desa.
- (2) Data sekunder penggunaan Dana Desa setiap provinsi yang diolah secara tabulasi dan dideskripsikan melalui rata-rata berdasarkan jenis penggunaan (bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembinaan) pada berbagai status desa (5 desa).
- (3) Manfaat untuk peningkatan kesejahteraan dianalisis secara deskriptif berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan menurut tingkat kesejahteraan dan status desa.
- (4) Faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan Dana Desa terkait dengan perkembangan status desa pada

masing-masing desa dianalisis secara tematis. Analisis tematis dilakukan dengan mengategorikan data berdasarkan 3 tema IDM: Ekonomi, Sosial dan Lingkungan di dalam sebuah matrik.

Sementara itu, tahap analisis adalah reduksi data, pengategorian data dalam tema-tema pada matrik yang telah ditentukan, dan interpretasi data. Indikasi faktor pendorong dan kendala dimasing-masing provinsi penggunaan Dana Desa untuk pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, selanjutnya dianalisis dengan metode *Success Tree Analysis* (STA) dan *Problem Tree Analysis* (PTA), sehingga membentuk anatomi permasalahan atau keberhasilan. Selain itu, kebutuhan inovasi bagi desa yang mengalami penurunan dan desa yang tidak mengalami perubahan status dianalisis secara deskriptif berdasarkan permasalahan maupun potensi sumber daya lokal. Inovasi Desa yang telah diterapkan pada desa yang mengalami kenaikan status dideskripsikan berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan

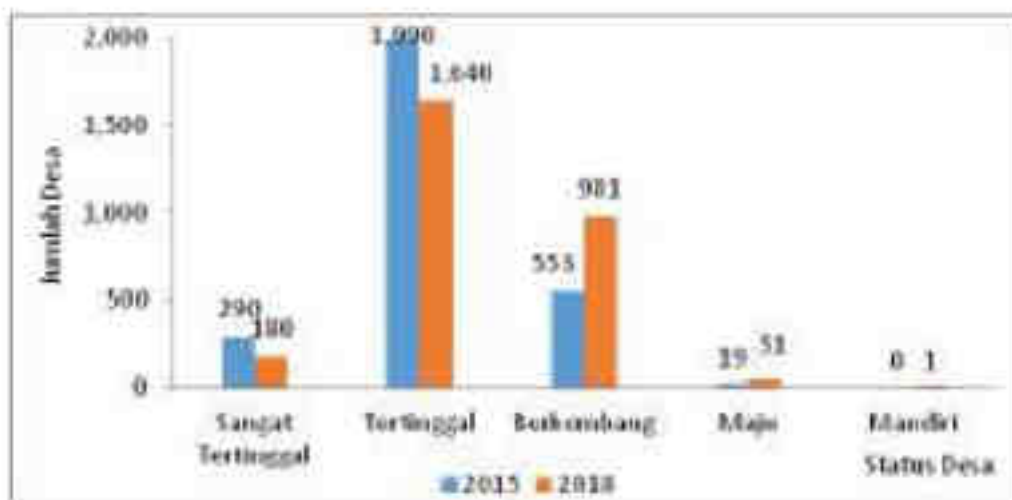


II

PERKEMBANGAN STATUS DESA

A. Status Perkembangan Desa di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan IDM 2015 dan 2018

Perkembangan status desa di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2018 memberikan gambaran adanya penurunan pada jumlah dengan status sangat tertinggal dan tertinggal. Desa sangat tertinggal pada tahun 2015 sebanyak 290 desa dan menurun pada tahun 2018 menjadi 180 desa, sementara itu desa dengan status tertinggal pada tahun 2015 sebanyak 1.990 desa kemudian menurun menjadi 1.640 desa pada tahun 2018 (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Perkembangan Status Desa di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2018

Sumber: Kemendesa, 2015 dan 2018 (diolah)

Di sisi lain, jumlah desa berkembang, maju dan mandiri mengalami peningkatan, bila tahun 2015 jumlah desa berkembang berjumlah 553 desa meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2018. Demikian juga desa maju yang mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat dari 19 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 51 desa pada tahun 2018. Peningkatan status desa juga terjadi pada status desa mandiri, jika pada tahun 2015 belum ada status desa mandiri namun pada tahun 2018 terdapat 1 desa mandiri.

Dilihat dari sebaran desa menurut kabupaten/kota, pada tahun 2015 jumlah desa sangat tertinggal terbesar terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu sebanyak 45 desa, desa tertinggal terbanyak ditempati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) sebanyak 218 desa, desa berkembang terbanyak terdapat di Kabupaten Muara Enim sebanyak 78 desa, desa maju terbanyak terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU dengan masing-masing jumlah desa sebanyak 4 desa. Desa dengan status mandiri hanya terdapat di Kabupaten OKI yaitu sebanyak 1 desa (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Status IDM Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

No	Kota/kab	Status Desa									
		Sangat Tertinggal		Tertinggal		Ber kembang		Maju		Mandiri	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Banyuasin	45	15,52	207	10,40	35	6,33	1	5,26	0	0,00
2	Empat Lawang	14	4,83	118	5,93	15	2,71	0	0,00	0	0,00
3	Lahat	30	10,34	299	15,03	28	5,06	1	5,26	0	0,00
4	Muara Enim	18	6,21	145	7,29	78	14,10	4	21,05	0	0,00
5	Musi Banyuasin	24	8,28	150	7,54	52	9,40	1	5,26	0	0,00
6	Musi Rawas	9	3,10	120	6,03	55	9,95	2	10,53	0	0,00
7	Musi Rawas Utara	11	3,79	59	2,96	11	1,99	1	5,26	0	0,00
8	Ogan Ilir	11	3,79	152	7,64	63	11,39	1	5,26	0	0,00
9	OKI	45	15,52	196	9,85	72	13,02	1	5,26	0	0,00
10	OKU	13	4,48	106	5,33	20	3,62	4	21,05	0	0,00
11	OKU Selatan	42	14,48	169	8,49	41	7,41	1	5,26	0	0,00
12	OKU Timur	18	6,21	218	10,95	68	12,30	1	5,26	0	0,00
13	Penukal Abab	9	3,10	43	2,16	12	2,17	1	5,26	0	0,00
14	Prabumulih	1	0,34	8	0,40	3	0,54	0	0,00	0	0,00
Total		290	100	1990	100	553	100	19	100	0	0

Sumber: Kemendesa, 2015 (diolah)

Memasuki tahun 2018 terjadi pergeseran status desa yang dinamis, desa sangat tertinggal terbanyak dijumpai di Kabupaten OKU Selatan yaitu sebanyak 33 desa, desa tertinggal dominan terdapat di Kabupaten Lahat (258 desa), desa berkembang terbanyak di OKU Timur (160 desa), desa maju terbesar di OKI (10 desa) dan desa mandiri sebanyak 1 desa terdapat di Kabupaten OKI (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Status Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Kota/kab	Status Desa									
		Sangat Tertinggal		Tertinggal		Ber kembang		Maju		Mandiri	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Banyuasin	16	8,89	164	10,00	101	10,30	7	13,73	0	0,00
2	Empat Lawang	2	1,11	92	5,61	51	5,20	2	3,92	0	0,00
3	Lahat	20	11,11	258	15,73	79	8,05	3	5,88	0	0,00
4	Muara Enim	6	3,33	115	7,01	119	12,13	5	9,80	0	0,00
5	Musi Banyuasin	6	3,33	111	6,77	107	10,91	3	5,88	0	0,00
6	Musi Rawas	8	4,44	69	4,21	104	10,60	5	9,80	0	0,00
7	Musi Rawas Utara	27	15,00	36	2,20	17	1,73	2	3,92	0	0,00
8	Ogan Ilir	0	0,00	190	11,59	37	3,77	0	0,00	0	0,00
9	OKI	23	12,78	173	10,55	107	10,91	10	19,61	1	0,00
10	OKU	18	10,00	82	5,00	40	4,08	3	5,88	0	0,00
11	Oku Selatan	33	18,33	180	10,98	38	3,87	1	1,96	0	0,00
12	Oku Timur	9	5,00	127	7,74	160	16,31	9	17,65	0	0,00
13	Penukal Abab	11	6,11	33	2,01	20	2,04	1	1,96	0	0,00
14	Prabumulih	1	0,56	10	0,61	1	0,10	0	0,00	0	0,00
Total		180	100	1640	100	981	100	51	100	1	0

Sumber: Kemendesa, 2018 (diolah)

A.1. Status Perkembangan Desa di Kabupaten OKI Berdasarkan IDM 2015 dan 2018

Secara umum perkembangan status desa di Kabupaten OKI untuk masing-masing tingkatan mengalami perkembangan yang sangat baik. Pada tahun 2015 desa dengan status sangat tertinggal sebanyak 45 desa namun pada tahun 2018 tersisa 23 desa. Demikian pun desa dengan status tertinggal, bila pada tahun 2015 sebanyak 196 desa menurun menjadi 173 desa pada tahun 2018. Di samping itu, desa status berkembang mengalami peningkatan dari 72 desa menjadi 107 desa, desa maju menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari 1 desa menjadi 10 desa, dan tahun 2018 terdapat 1 desa mandiri (Gambar 2.2)



Gambar 2.2. Perkembangan Status Desa di Kabupaten OKI Tahun 2015 dan 2018

Sumber: Kemendesa, 2015 dan 2018 (diolah)

Dekomposisi status menurut kecamatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 status desa tertinggal terbanyak dijumpai di daerah perairan seperti Kecamatan Cengal dengan jumlah desa tertinggal sebanyak 9 desa atau 20% dari total desa tertinggal yang ada di Kabupaten OKI. Sementara itu, status desa tertinggal tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan proporsi yang relatif sama, terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Lampam (16 desa). Desa berkembang terbanyak terdapat di Kecamatan Mesuji Raya (8 desa), sementara itu desa maju hanya terdapat di Kecamatan Lempuing (Tabel 2.3)

Tabel 2.3. Status Kecamatan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

No	Kota/kab	Status Desa									
		Sangat Tertinggal		Tertinggal		Ber kembang		Maju		Mandiri	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Air Sugihan	1	2,22	13	6,63	5	6,94	0	0,00	0	0,00
2	Cengal	9	20,00	8	4,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Jejaw	6	13,33	12	6,12	1	1,39	0	0,00	0	0,00
4	Kayu Agung	1	2,22	11	5,61	2	2,78	0	0,00	0	0,00
5	Lempuing	0	0,00	11	5,61	7	9,72	1	100,00	0	0,00
6	Lempuing Jaya	3	6,67	9	4,59	4	5,56	0	0,00	0	0,00
7	Mesuji	1	2,22	8	4,08	7	9,72	0	0,00	0	0,00
8	Mesuji Makmur	1	2,22	13	6,63	6	8,33	0	0,00	0	0,00

9	Mesuji Raya	2	4,44	7	3,57	8	11,11	0	0,00	0	0,00
10	Pampangan	3	6,67	13	6,63	6	8,33	0	0,00	0	0,00
11	Pangkalan Lapam	2	4,44	16	8,16	1	1,39	0	0,00	0	0,00
12	Pedamaran	0	0,00	11	5,61	3	4,17	0	0,00	0	0,00
13	Pedamaran Timur	0	0,00	3	1,53	4	5,56	0	0,00	0	0,00
14	Sirah Pulau Padang	2	4,44	15	7,65	3	4,17	0	0,00	0	0,00
15	Sungai Menang	5	11,11	11	5,61	2	2,78	0	0,00	0	0,00
16	Tanjung Lubuk	3	6,67	13	6,63	5	6,94	0	0,00	0	0,00
17	Teluk Gelam	0	0,00	8	4,08	6	8,33	0	0,00	0	0,00
18	Tulung Selapan	6	13,33	14	7,14	2	2,78	0	0,00	0	0,00
Total		45	100	196	100	72	100	1	100	0	0

Sumber: Kemendesa, 2015 (diolah)

Pada tahun 2018 sebaran desa sangat tertinggal terkonsentrasi di Kecamatan Tulung Selapan yaitu sebanyak 6 desa, jumlah status desa sangat tertinggal di kecamatan tersebut tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan status pada tahun 2015. Pergerakan yang cepat terjadi pada status desa berkembang. Beberapa kecamatan tercatat mengalami peningkatan tinggi seperti Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji. Bila pada tahun 2015 masing-masing terdapat 7 desa berkembang, namun memasuki tahun 2018 meningkat menjadi masing-masing 15 desa dan 14 desa. Sama halnya dengan status desa maju, bila

tahun 2015 hanya terdapat 1 desa maju, akan tetapi pada tahun 2018 desa maju mulai tersebar di Kecamatan Mesuji Raya (4 desa), Lempuing Jaya (3 desa), Teluk Gelam (2 desa), dan Kecamatan Lempuing sebanyak 1 desa (Tabel 2.4)

Tabel 2.4. Status Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Kota/kab	Status Desa									
		Sangat Tertinggal		Tertinggal		Ber kembang		Maju		Mandiri	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Air Sugihan	1	4,35	13	7,51	5	4,67	0	0,00	0	0,00
2	Cengal	4	17,39	11	6,36	2	1,87	0	0,00	0	0,00
3	Jejawi	0	0,00	12	6,94	7	6,54	0	0,00	0	0,00
4	Kayu Agung	1	4,35	11	6,36	2	1,87	0	0,00	0	0,00
5	Lempuing	0	0,00	2	1,16	15	14,02	1	10,00	1	100,00
6	Lempuing Jaya	0	0,00	7	4,05	6	5,61	3	30,00	0	0,00
7	Mesuji	0	0,00	2	1,16	14	13,08	0	0,00	0	0,00
8	Mesuji Makmur	0	0,00	11	6,36	9	8,41	0	0,00	0	0,00
9	Mesuji Raya	1	4,35	6	3,47	6	5,61	4	40,00	0	0,00
10	Pampangan	4	17,39	14	8,09	4	3,74	0	0,00	0	0,00
11	Pangkalan Lapan	0	0,00	13	7,51	6	5,61	0	0,00	0	0,00
12	Pedamaran	0	0,00	13	7,51	1	0,93	0	0,00	0	0,00

13	Pedamaran Timur	0	0,00	4	2,31	3	2,80	0	0,00	0	0,00
14	SP. Padang	0	0,00	5	2,89	15	14,02	0	0,00	0	0,00
15	Sungai Menang	5	21,74	12	6,94	1	0,93	0	0,00	0	0,00
16	Tanjung Lubuk	1	4,35	17	9,83	3	2,80	0	0,00	0	0,00
17	Teluk Gelam	0	0,00	8	4,62	4	3,74	2	20,00	0	0,00
18	Tulung Selapan	6	26,09	12	6,94	4	3,74	0	0,00	0	0,00
Total		23	100	173	100	107	100	10	100	1	100

Sumber: Kemendesa, 2018 (diolah)

Perubahan status desa sangat tertinggal pada tahun 2018 terbanyak terdapat di Kecamatan Cengal dan Kecamatan Jejawi, namun demikian masih dijumpai desa yang tidak mengalami perubahan dari desa sangat tertinggal tetap menjadi desa sangat tertinggal yaitu desa-desa di Kecamatan Pampangan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tanjung Lubuk dan Kecamatan Tulung Selapan dengan total desa sebanyak 6 desa. Desa sangat tertinggal yang mengalami perubahan status menjadi desa tertinggal dan berkembang sebanyak 37 desa (Tabel 2.5).

**Tabel 2.5. Perubahan Status Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Menurut IDM Tahun 2015 dan 2018**

No	Kecamatan	Perubahan Status Desa (Jumlah)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Air Sugihan	0	0	7	6	0	37	0	0
2	Cengal	8	1	0	6	0	0	0	0
3	Jejaw	6	0	7	5	0	0	0	0
4	Kayu Agung	1	0	2	8	0	0	0	0
5	Lempuing	0	0	2	7	0	1	1	0
6	Lempuing Jaya	3	0	4	4	2	5	0	0
7	Mesuji	1	0	4	4	0	0	0	0
8	Mesuji Makmur	1	0	4	8	0	5	0	0
9	Mesuji Raya	2	0	1	5	0	5	0	0
10	Pampangan	2	1	5	6	0	6	0	0
11	Pangkalan Lapan	2	0	3	12	0	2	0	0
12	Pedamaran	0	0	1	10	0	0	0	0
13	Pedamaran Timur	0	0	2	1	0	2	0	0
14	SP. Padang	2	0	7	7	0	3	0	0
15	Sungai Menang	4	1	2	6	0	3	0	0
16	Tanjung Lubuk	1	1	4	9	0	2	0	0
17	Teluk Gelam	0	0	3	4	0	1	0	0
18	Tulung Selapan	4	2	4	9	0	2	0	0
Total		37	6	62	117	2	74	1	0

Sumber: Kemendes, 2018 (diolah)

Keterangan Kolom:

1. Desa sangat tertinggal (2015) dengan status telah meningkat menjadi desa tertinggal/berkembang (2018).
2. Desa sangat tertinggal (2015) dengan status tetap (2018).
3. Desa tertinggal (2015) dengan status telah meningkat menjadi desa berkem-

bang/maju(2018).

4. Desa tertinggal (2015) dengan status tetap (2018).
5. Desa berkembang (2015) dengan status telah meningkat menjadi desa maju/mandiri (2018).
6. Desa berkembang (2015) dengan status tetap (2018).
7. Desa maju (2015) dengan status telah meningkat menjadi desa mandiri (2018).
8. Desa maju (2015) dengan status tetap (2018).

Perubahan status dari desa tertinggal menuju desa berkembang terjadi di 62 desa yang hampir tersebar di semua kecamatan yang ada di OKI, seperti Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang. Transformasi desa berkembang menuju desa maju dialami oleh 2 desa yang terdapat di Kecamatan Lempuing Jaya sedangkan desa yang menjadi status mandiri sebanyak 1 desa yang terdapat di Kecamatan Lempuing.

A.2. Penyebaran Perubahan Status Desa dari Tahun 2015-2018

A.2.1. Perubahan Status Desa dari Sangat Tertinggal menjadi Tertinggal

Secara detail perkembangan desa sangat tertinggal menjadi tertinggal dapat dilihat pada Tabel 2.6. Seperti telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, peningkatan status desa dari sangat tertinggal terdapat di 29 desa yang menyebar di 13 kecamatan.

Tabel 2.6 Perubahan Status Desa dari Sangat Tertinggal ke Tertinggal

No	Provinsi	Kab.	Kecamatan	Desa	Status 2015	Status 2018
1	Sumsel	OKI	Cengal	Adil Makmur	ST	T
2	Sumsel	OKI	Tanjung Lubuk	Atar Balam	ST	T
3	Sumsel	OKI	Cengal	Balam Jeruju	ST	T
4	Sumsel	OKI	Mesuji Raya	Balian	ST	T
5	Sumsel	OKI	Pampangan	Bangsai	ST	T
6	Sumsel	OKI	Mesuji Raya	Embacang	ST	T
7	Sumsel	OKI	Sungai Menang	Gading Mas	ST	T
8	Sumsel	OKI	Sungai Menang	Gajah Makmur	ST	T
9	Sumsel	OKI	Sungai Menang	Harapan Jaya	ST	T
10	Sumsel	OKI	Cengal	Kebon Cabe	ST	T
11	Sumsel	OKI	Cengal	Lebak Beriang	ST	T
12	Sumsel	OKI	Jejawi	Lubuk Ketepeng	ST	T
13	Sumsel	OKI	Cengal	Parit Raya	ST	T
14	Sumsel	OKI	Jejawi	Pedu	ST	T
15	Sumsel	OKI	Pampangan	Pulau Layang	ST	T
16	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Rantau Durian Asli	ST	T
17	Sumsel	OKI	Pangkalan Lapam	Rawa Tenam	ST	T
18	Sumsel	OKI	SP Padang	Rawang Besar	ST	T
19	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Smpg. Tiga Abadi	ST	T
20	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Simpang Tiga Sakti	ST	T
21	Sumsel	OKI	Cengal	Sungai Ketupak	ST	T
22	Sumsel	OKI	Mesuji	Sungai Sodong	ST	T
23	Sumsel	OKI	Cengal	Sungai Somor	ST	T

24	Sumsel	OKI	Pangkalan Lapam	Sunggutan	ST	T
25	Sumsel	OKI	Jejawi	Talang Cempedak	ST	T
26	Sumsel	OKI	Jejawi	Tanjung Aur	ST	T
27	Sumsel	OKI	Kayu Agung	Tanjung Menang	ST	T
28	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Tanjung Sari	ST	T
29	Sumsel	OKI	Jejawi	Terusan Jawa	ST	T

Sumber: Kemendesa, 2018 (Diolah)

Keterangan:

ST = sangat tertinggal; T = Tertinggal

A.2.2. Perubahan Status Desa dari Sangat Tertinggal Menjadi Berkembang

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 8 desa yang mengalami perubahan yang drastis dari status sangat tertinggal menjadi berkembang. Desa-desa tersebut yaitu Desa Karangsia, Karya Jaya, Padang Bulan, Pantai, Pantai Harapan, Purwo Asri, Simpang Tiga, Simpang Tiga Jaya (Tabel 2.7)

Tabel 2.7 Perubahan Status Desa dari Sangat Tertinggal ke Berkembang

No	Provinsi	Kab.	Kecamatan	Desa	Status 2015	Status 2018
1	Sumsel	OKI	Sungai Menang	Karangsia	ST	B
2	Sumsel	OKI	Mesuji Makmur	Karya Jaya	ST	B
3	Sumsel	OKI	Jejaw	Padang Bulan	ST	B
4	Sumsel	OKI	SP. Padang	Pantai	ST	B
5	Sumsel	OKI	Cengal	Pantai Harapan	ST	B
6	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Purwo Asri	ST	B
7	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Simpang Tiga	ST	B
8	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Simpang Tiga Jaya	ST	B

Sumber: Kemendesa, 2018 (Diolah)

ST – sangat tertinggal; B – Berkembang

A.2.3. Perubahan Status Desa dari Tertinggal Menjadi Berkembang

Jumlah desa yang mengalami perkembangan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 62 desa yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah desa paling banyak mengalami perubahan dari desa tertinggal menuju desa berkembang yaitu Kecamatan Air Sugihan dan Jejaw masing-masing 7 desa, Kecamatan Pampangan (5 desa) dan Kecamatan Sirah Pulang padang sebanyak 5 desa (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Perubahan Status Desa dari Tertinggal Menjadi Berkembang

No	Provinsi	Kab.	Kecamatan	Desa	Status 2015	Status 2018
1	Sumsel	OKI	Jejawi	Air Hitam	T	B
2	Sumsel	OKI	Kota Kayu Agung	Arisan Buntal	T	B
3	Sumsel	OKI	Mesuji Raya	Balian Makmur	T	B
4	Sumsel	OKI	SP. Padang	Batu Ampar	T	B
5	Sumsel	OKI	SP. Padang	Batu Ampar Baru	T	B
6	Sumsel	OKI	SP. Padang	Belanti	T	B
7	Sumsel	OKI	Teluk Gelam	Benawa	T	B
8	Sumsel	OKI	SP. Padang	Berkat	T	B
9	Sumsel	OKI	Jejawi	Bubusan	T	B
10	Sumsel	OKI	Teluk Gelam	Bumi Harapan	T	B
11	Sumsel	OKI	SP. Padang	Bungin Tinggi	T	B
12	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Cambai	T	B
13	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Jadi Mulya	T	B
14	Sumsel	OKI	Tanjung Lubuk	Jambu Ilir	T	B
15	Sumsel	OKI	Pampangan	Jungkal	T	B
16	Sumsel	OKI	Mesuji	Kali Deras	T	B
17	Sumsel	OKI	Pampangan	Keman Baru	T	B
18	Sumsel	OKI	Mesuji	Kmbg. Jajar Sp7 At	T	B
19	Sumsel	OKI	Lempuing	Kepahyang	T	B
20	Sumsel	OKI	Kota Kayu Agung	Kijang Ulu	T	B
21	Sumsel	OKI	Pampangan	Kuro	T	B
22	Sumsel	OKI	Jejawi	Lingkis	T	B
23	Sumsel	OKI	Pedamaran Timur	Mari Baya	T	B
24	Sumsel	OKI	Mesuji	Mekar Wangi	T	B
25	Sumsel	OKI	Pedamaran	Menang Raya	T	B
26	Sumsel	OKI	Mesuji Makmur	Mesuji Jaya	T	B

No	Provinsi	Kab.	Kecamatan	Desa	Status 2015	Status 2018
27	Sumsel	OKI	Jejaw	Muara Batun	T	B
28	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Mukti Sari	T	B
29	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Nusa Karta	T	B
30	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Pangkalan Sakti	T	B
31	Sumsel	OKI	Mesuji Makmur	Pematang Jaya	T	B
32	Sumsel	OKI	Mesuji	Pematang Kasih	T	B
33	Sumsel	OKI	Jejaw	Pematang Kijang	T	B
34	Sumsel	OKI	Mesuji Makmur	Pematang Sukatani	T	B
35	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Penanggoan Duren	T	B
36	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Penyandingan	T	B
37	Sumsel	OKI	Tanjung Lubuk	P. Gemantung Ilir	T	B
38	Sumsel	OKI	Pedamaran Timur	Pulau Geronggang	T	B
39	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Rantau Karya	T	B
40	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Rengas Abang	T	B
41	Sumsel	OKI	Pangkalan Lapam	Rimba Samak	T	B
42	Sumsel	OKI	Teluk Gelam	Serapek	T	B
43	Sumsel	OKI	Pampangan	Serdang	T	B
44	Sumsel	OKI	Sungai Menang	Sido Mulyo	T	B
45	Sumsel	OKI	SP. Padang	SP Padang	T	B
46	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Sri Jaya Baru	T	B
47	Sumsel	OKI	Air Sugihan	Suka Mulya	T	B
48	Sumsel	OKI	Pangkalan Lapam	Suka Raja	T	B
49	Sumsel	OKI	Jejaw	Sukadarma	T	B
50	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Sukamaju	T	B
51	Sumsel	OKI	Tanjung Lubuk	Sukarami	T	B
52	Sumsel	OKI	Sungai Menang	Sungai Ceper	T	B

No	Provinsi	Kab.	Kecamatan	Desa	Status 2015	Status 2018
53	Sumsel	OKI	Mesuji Makmur	Surya Karta	T	B
54	Sumsel	OKI	Pangkalan Lapan	Talang Daya	T	B
55	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Tania Makmur	T	B
56	Sumsel	OKI	Jejawi	Tanjung Ali	T	B
57	Sumsel	OKI	Tanjung Lubuk	Tanjung Laut	T	B
58	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Tanjung Sari II	T	B
59	Sumsel	OKI	Lempuing	Tulung Harapan	T	B
60	Sumsel	OKI	Tulung Selapan	Ujung Tanjung	T	B
61	Sumsel	OKI	Pampangan	Ulak Depati	T	B
62	Sumsel	OKI	SP. Padang	Ulak Jerman	T	B

Sumber: Kemendesa, 2018 (diolah)

Keterangan: T – Tertinggal; B – Berkembang

A.2.4. Perubahan Status Desa dari Berkembang menjadi Maju dan Desa Maju Menjadi Mandiri

Terdapat dua desa yang mengalami perkembangan dari desa berkembang menjadi desa maju yaitu Desa Lubuk Seberuk dan Desa Muara Burnai II yang terletak di Kecamatan Lempuing Jaya, dan satu desa berubah status dari maju menjadi Mandiri yaitu Desa Tugumulyo (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Perubahan Status Desa dari Berkembang menjadi Maju dan Desa Maju Menjadi Mandiri

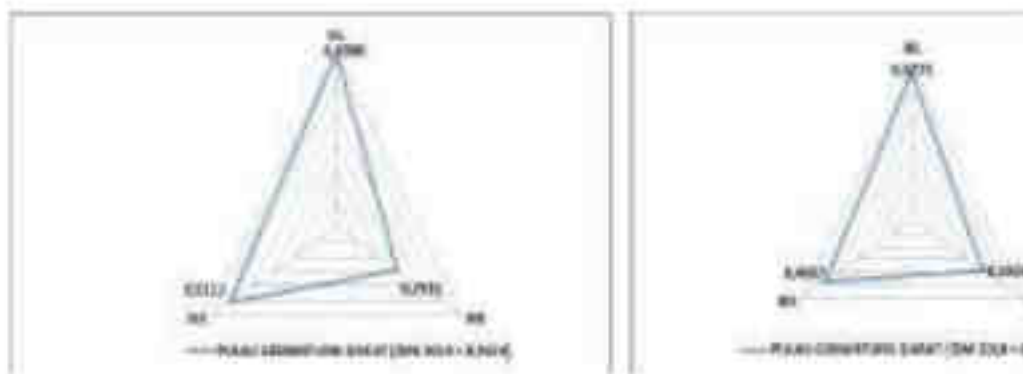
No	Provinsi	Kab.	Kecamatan	Desa	Status 2015	Status 2018
1	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	B	Mj
2	Sumsel	OKI	Lempuing Jaya	Muara Burnai II	B	Mj
Desa maju Menjadi Mandiri						
1	Sumsel	OKI	Lempuing	Tugumulyo	Mj	Md

Sumber: Kemendesa, 2018 (diolah) Keterangan: B – Berkembang; Mj – Maju; Md – Mandiri

B. Dinamika Perubahan Status Desa

B.1. Desa Pulau Gemantung Darat

Secara lebih detail perkembangan Sub Dimensi IDM masing-masing desa pada tahun 2015 dan 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Nilai indeks desa membangun Desa Pulau Gemantung mengalami peningkatan yang cukup baik untuk semua sub dimensi pada Indeks dalam Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Gambar 2.3 mendeskripsikan indeks ketahanan ekonomi yang meningkat dari 0,2911 pada tahun 2015 menjadi 0,3833 di tahun 2018. Bila dilihat per sub dimensi pembentuk indeks ketahanan ekonomi, terdapat 3 sub indikator yang mengalami peningkatan signifikan yaitu akses penduduk ke pusat perdagangan yang menjadi relatif pendek dari 13 km menjadi 7 km, pengurangan jarak ini didorong adanya perbaikan akses jalan desa.



Gambar 2.3 Nilai Sub Dimensi IDM Desa Pulau Gemantung Darat

Sumber: Kemendesa, 2015 dan 2018 (diolah)

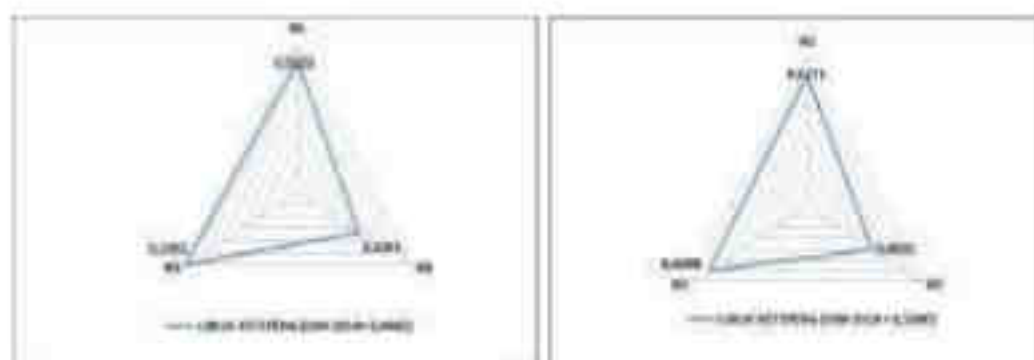
Selain itu, telah terjadi perubahan terhadap keragaman produksi dari monokultur kegiatan ekonomi menjadi lebih bervariasi. Aktivitas ekonomi juga mulai tampak membaik yang ditandai oleh kegiatan perdagangan (warung) dan terdapatnya kedai makanan.

Aspek ketahanan sosial mengalami peningkatan yang cukup baik dari 0,511 tahun 2015 menjadi 0,4667 pada tahun 2018. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya akses ke sarana kesehatan (poskesdes, polindes dan posyandu), dan berkurangnya jarak tempuh ke sarana pendidikan SMP. Sementara itu, Indeks ketahanan lingkungan di Desa Pulau Gemantung mengalami penurunan dari 0,60 menjadi 0,5771.

B.2. Desa Lubuk Ketepeng

Indeks Desa Membangun Desa Lubuk Ketepeng menunjukkan peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 0,4860 meningkat menjadi 0,5390. Peningkatan aktivitas ekonomi mendorong kenaikan indeks ketahanan ekonomi di Desa Lubuk Ketepeng dari 0,3291 di tahun 2015 menjadi 0,4 pada tahun 2018. Terdapat

beberapa sub dimensi yang mengalami peningkatan seperti telah adanya pasar desa dan tersedianya lembaga ekonomi (koperasi). Sub dimensi lainnya seperti IKL juga mengalami kenaikan dari 0,533 menjadi 0,6171 yang didorong oleh berkurangnya kebakaran hutan, dan banjir.



Gambar 2.4 Nilai Sub Dimensi IDM Desa Lubuk Ketepeng

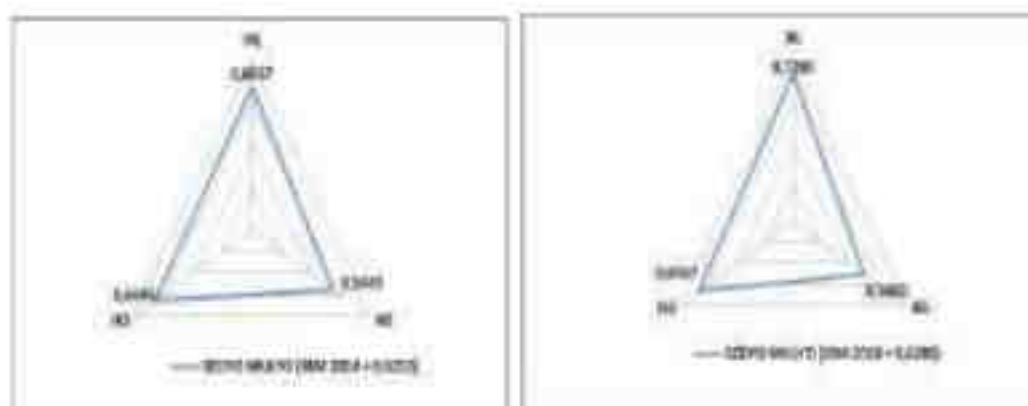
Sumber: Kemendesa, 2015 dan 2018 (diolah)

Indeks ketahanan sosial juga terlihat meningkat sangat tipis dari 0,5955 menjadi 0,60. Hal ini didorong oleh adanya perkembangan dalam dunia telekomunikasi menyebabkan desa bisa terhubung dengan jaringan internet (Gambar 2.4)

B.3. Desa Sedyo Mulyo

Indeks desa membangun Desa Sedyo Mulyo mengalami peningkatan dari 0,6235 pada tahun 2015 menjadi 0,6289 pada tahun 2018. Bila dilihat dari dekomposisi pembentuk IDM, indeks ketahanan ekonomi terlihat mengalami penurunan terutama pada sub dimensi keragaman produksi dan pusat pelayanan perdagangan. Sementara itu, dimensi ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan sosial mengalami peningkatan yang relatif baik. IKL mengalami peningkatan

yang fantastis dari 0,667 menjadi 0,720 dan IKS menunjukkan kenaikan yang relatif datar dari 0,6595 menjadi 0,6677 (Gambar 2.5)

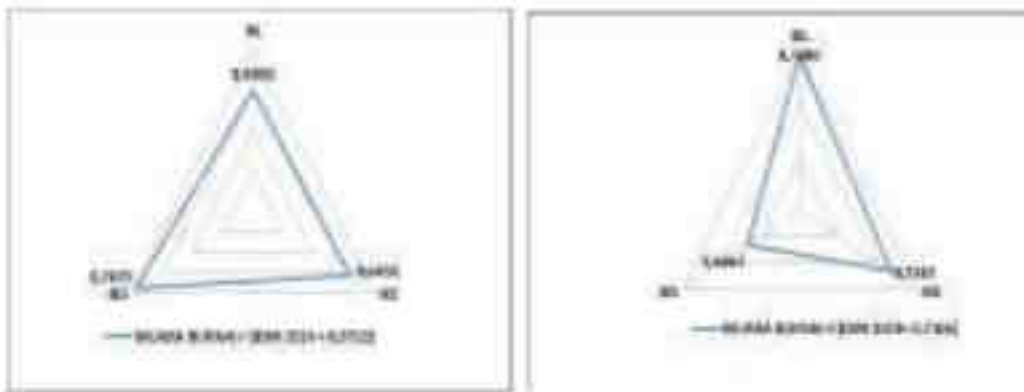


Gambar 2.5 Nilai Sub Dimensi IDM Desa Sedyo Mulyo

Sumber: Kemendes, 2015 dan 2018 (diolah)

B.4. Desa Muara Burnai II

Letak geografis Desa Muara Burnai II yang terletak di Jalan lintas Timur Pulau Sumatera mendorong adanya akses ekonomi yang relatif lebih baik. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai IDM dari 0,672 pada tahun 2015 menjadi 0,7106 pada tahun 2018. Peningkatan terjadi pada dua indeks yaitu indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. IKE mengalami kenaikan dari 0,6456 menjadi 0,7167, bila dilihat dari sub dimensi pembentuk IKE, perkembangan IKE yang cukup besar tersebut didorong oleh adanya perbaikan pada sub dimensi pusat layanan perdagangan terutama munculnya minimarket, kedai makanan dan restoran.



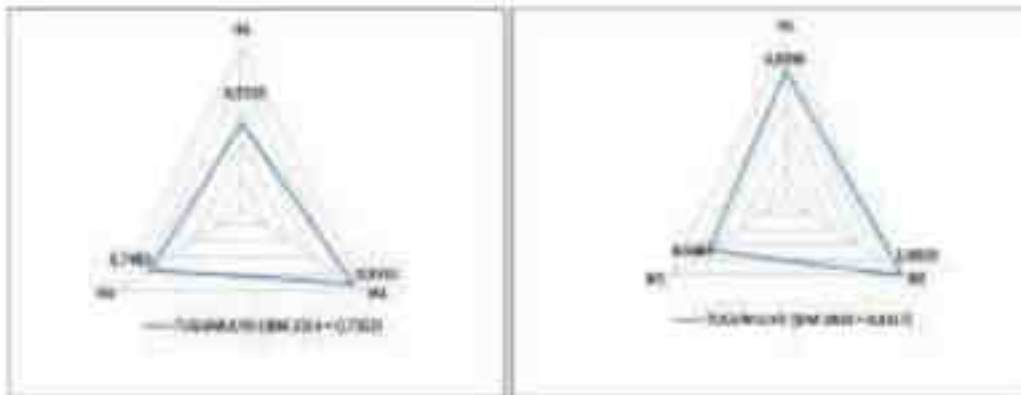
Gambar 2.6 Nilai Sub Dimensi IDM Desa Muara Burnai II

Sumber: Kemendes, 2015 dan 2018 (diolah)

IKL juga menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dari 0,60 menjadi 0,7484 hal ini didorong oleh berkurangnya bencana alam seperti kebakaran hutan (Gambar 2.6)

B.5. Desa Tugumulyo

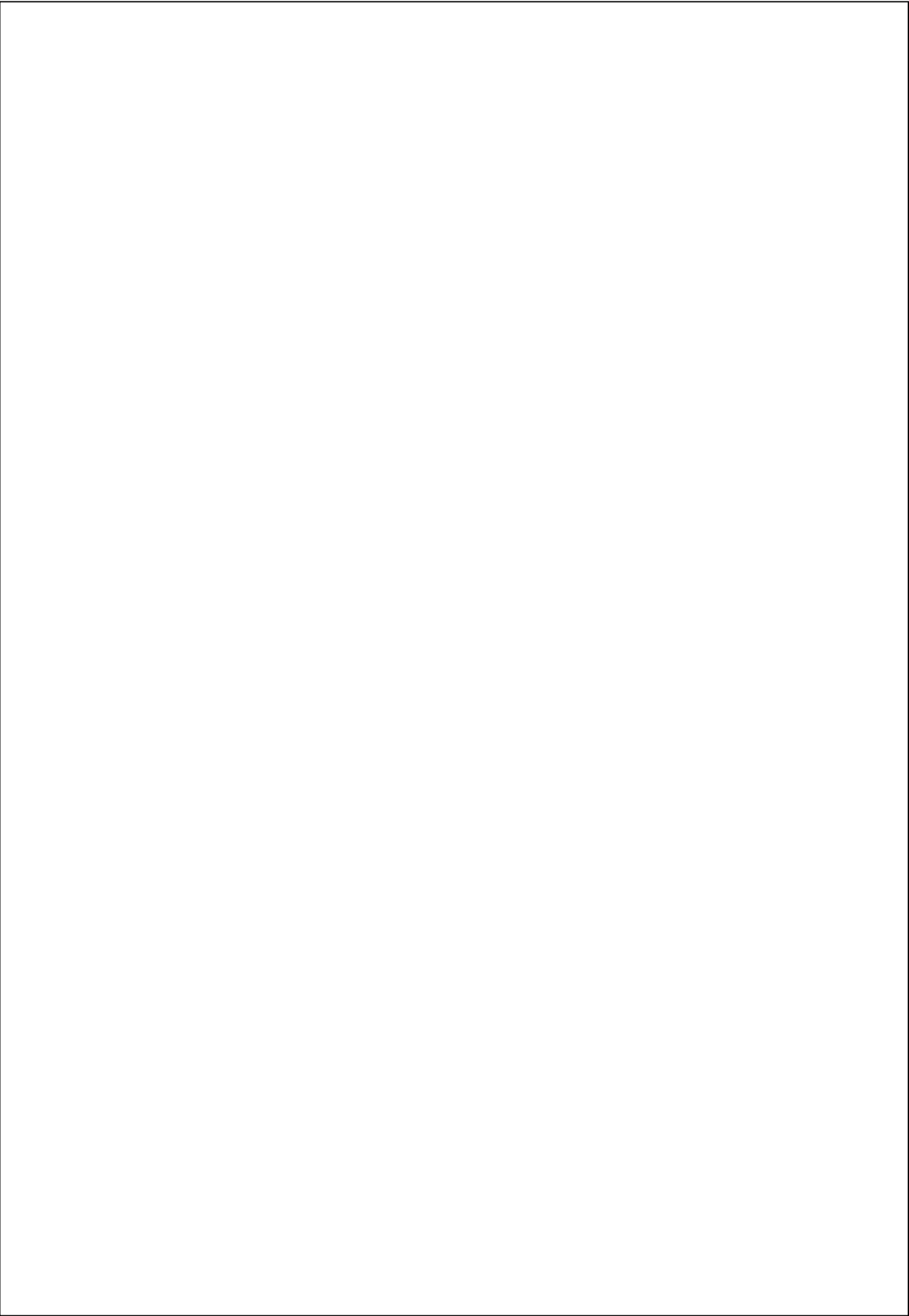
Desa Tugumulyo mengalami peningkatan status dari desa maju menjadi desa mandiri. Dua dimensi pembentuk IDM menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu IKE dan IKL. IKE ditopang oleh meningkatnya aktivitas sektor jasa seperti restoran, hotel dan penginapan sehingga IKE meningkat dari 0,9241 menjadi 1. Sementara itu IKL meningkat didorong oleh berkurangnya kebakaran hutan, sehingga IKL meningkat dari 0,533 menjadi 0,8286.



Gambar 2.7 Nilai Sub Dimensi IDM Desa Tugumulyo

Sumber: Kemendes, 2015 dan 2018 (diolah)

Namun demikian, IKS mengalami penurunan yang cukup tajam dari 0,7483 menjadi 0,667. Penurunan tersebut pada sub dimensi modal sosial pada indikator konflik, penyanggah masalah sosial dan faktor keamanan (rawan pencurian). Faktor tersebut menjadi masalah utama dalam mendorong peningkatan IKS di Desa Tugumulyo.



III

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa bertujuan menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Hal ini bermakna bahwa Dana Desa yang diberikan pemerintah digunakan harus mendorong pembangunan wilayah perdesaan. Pembangunan wilayah perdesaan menurut Deaton dan Nelson (1992) adalah alokasi fisik (infrastruktur), sosial dan sumber daya manusia. Ketiga aspek ini mampu menyediakan berbagai kemungkinan seperti: 1) menyediakan pendapatan untuk seluruh anggota keluarga, 2) pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja dan kewarganegaraan, 3) akses pembangunan kesehatan, 4) pengembangan ekonomi regional dan ekonomi masyarakat (*community economics*).

Implementasi penggunaan Dana Desa oleh pemerintah sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Deaton dan Nelson. Pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan terutama kawasan perdesaaan (Mutu'ali, 2013). Infrastruktur memungkinkan bisnis perdesaan mudah mengakses input dan pasar. Infrastruktur yang dibangun harus mampu meminimumkan biaya pelaksanaan bisnis dan mampu untuk memfasilitasi proses produksinya. Investasi

dalam bidang infrastruktur akan mendorong pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin (*pro-poor*), peningkatan akses pada infrastruktur, mengurangi risiko dan biaya transaksi yang terkait dengan produksi dan distribusi produknya (Hubeis 2011).

Dana Desa digunakan untuk bidang pembangunan desa/ infrastruktur, pengembangan ekonomi, pembangunan sosial, dan bidang kesejahteraan masyarakat. Berikut akan dijelaskan secara rinci penggunaan Dana Desa di tingkat provinsi, kabupaten dan desa kajian.

A. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa

A.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Selatan

Hasil kajian menunjukkan secara umum penggunaan Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2015-2018 diperuntukan pada Bidang Pembangunan Desa (Fisik). Alokasi dana untuk pembangunan desa pada tahun 2015 sebesar Rp565.985.245 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp1.412.366.101 ribu atau selama 3 tahun tumbuh rata-rata sebesar 49,84%.

Tabel 3.1 Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

No	Jenis Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018*
1	Jalan Desa	409.827.890	819.237.743	960.791.241	204.340.228
2	Jembatan	28.983.632	91.576.572	99.100.877	8.942.805
3	Drainase	64.616.797	181.731.239	181.802.643	24.080.839
4	Penahan Tanah	5.810.602	29.870.700	45.428.131	12.986.360
5	Tambatan Perahu	1.944.195	3.937.336	4.172.820	1.708.360
6	Irigasi	3.008.440	9.412.482	11.283.422	15.102.633
7	Plat Duiker	6.091.433	14.495.614	23.236.123	NA
8	Sarpras Lainnya	45.902.456	76.705.941	86.550.844	NA
Total Pembangunan Desa		585.985.245	1.226.967.629	1.412.366.101	265.161.025

* Sampai dengan Triwulan I

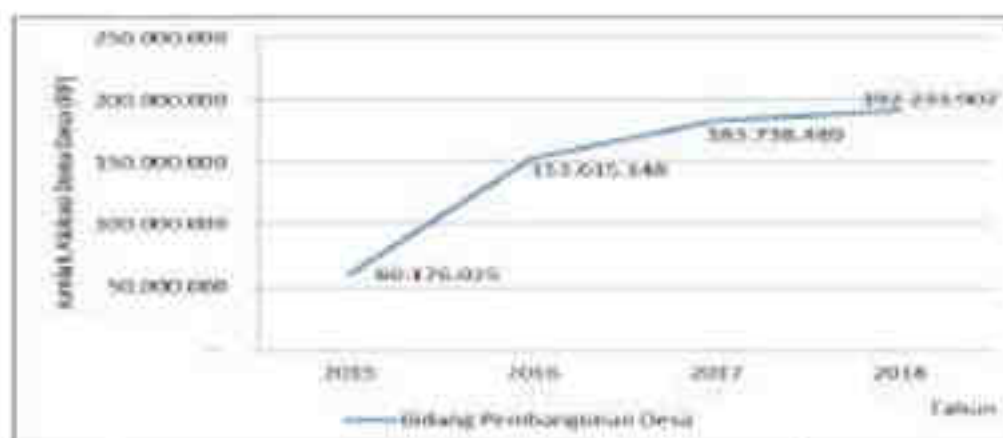
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (diolah)

Dana Desa untuk pembangunan desa sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan (Tabel 3.1). Kurun waktu 2015-2017 tren penggunaan Dana Desa untuk pembangunan jalan desa meningkat tajam lebih dari dua kali lipat. Selain itu, Dana Desa juga dipergunakan untuk pembangunan Jembatan, Drainase, Tembok Penahan Tanah (TPT), Tambatan Perahu, irigasi, Plat Duiker. Komposisi penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Triwulan I), masih dominan diperuntukan untuk pembangunan jalan desa dan drainase.

A.2. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dana Desa yang dipergunakan untuk pembangunan desa di kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015 Dana Desa untuk pembangunan

infrastruktur desa sebesar Rp60.176.025 ribu meningkat menjadi Rp192.233.907 ribu pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan lebih dari 300%. Peningkatan alokasi Dana Desa untuk bidang infrastruktur dipergunakan untuk membangun sarana jalan desa dan jembatan (Gambar 2.6)



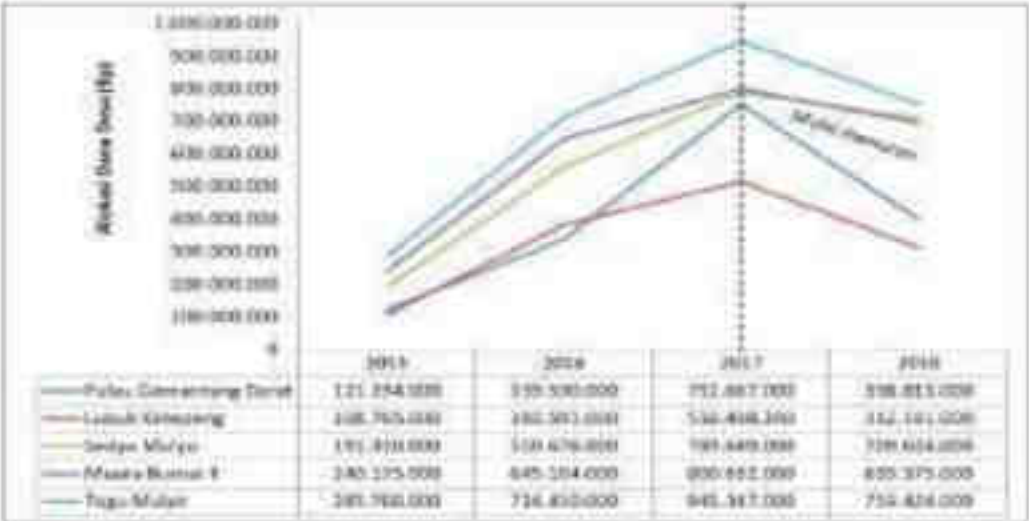
Gambar 3.1 Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa tahun 2015-2018

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2018 (diolah)

A.3. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Desa Kajian

Alokasi Dana Desa di lima desa yang dijadikan sampel menunjukkan dana bidang pembangunan desa memiliki proporsi terbesar. Sama halnya dengan pengalokasian Dana Desa pada tingkat Provinsi dan Kabupaten, Desa-desanya yang menjadi kajian masih mengalokasikan sebagian besar Dana Desa untuk pembangunan fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa keperluan infrastruktur masih sangat dominan di desa kajian. Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan di lima desa

lokasi kajian menunjukkan tren yang berfluktuatif, di mana pada tahun 2018 semua desa mengalami penurunan. Penurunan alokasi dana untuk bidang pembangunan desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana yang mulai dipergunakan untuk bidang lainnya (Gambar 3.2)



Gambar 3.2 Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa di Desa Sampel Tahun 2015-2018

Sumber: APBDes, 2018

B. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pengembangan Ekonomi

B.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Selatan

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi seperti pembangunan pasar desa, BUMDesa selama tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bila tahun 2015 sebesar Rp5.842.485 ribu meningkat hampir 7 kali lipat pada

tahun 2017 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 161,48%.

Tabel 3.2 Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

No	Jenis Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pasar Desa	5.444.957	13.640.676	22.783.124	7.940.273
2	Embung	0	428.129	2.904.192	5.052.880
3	BUMDES	397.528	3.061.301	8.458.531	10.485.497
Total Pembangunan Ekonomi		5.842.485	17.130.107	34.145.847	23.478.649

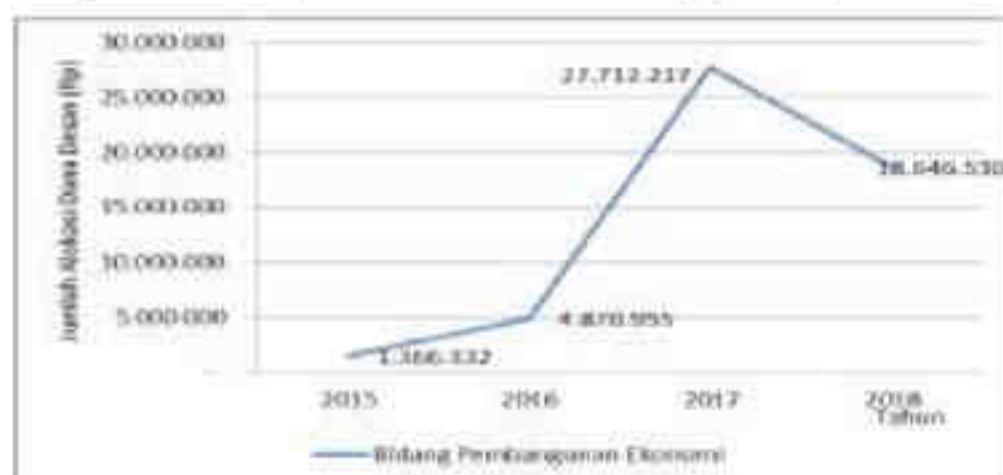
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (diolah)

Alokasi Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dalam 4 tahun pelaksanaan undang-undang desa masih relatif kecil. Dana Desa diperuntukan untuk memacu aktivitas ekonomi masyarakat seperti pembangunan pasar, embung untuk kebutuhan/persediaan air baku masyarakat, dan pembentukan BUMDesa. Walaupun demikian, alokasi Dana Desa untuk ketiga jenis kegiatan tersebut menunjukkan tren yang positif (Tabel 3.2)

B.2. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penggunaan Dana Desa menurut kabupaten menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda dengan kecenderungan di provinsi (Gambar 3.3). Dekomposisi Dana Desa berdasarkan kabupaten menggambarkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

mengalokasikan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa sebesar 92,5%, diikuti Kabupaten Ogan Ilir (87,5%) dan Kabupaten Lahat sebesar 85,5%. Kabupaten yang paling sedikit mengalokasikan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa yaitu Kabupaten Banyu Asin (47,7%), persentase tersebut hampir sama dengan alokasi untuk bidang pembangunan kesra.



Gambar 3.3 Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2018 (diolah)

Pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dalam jangka panjang menjadi faktor pendorong daya saing desa. Dana Desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara umum menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015 alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.366.332 meningkat sangat cepat ditahun 2017 menjadi Rp27.712.217 ribu (Gambar 3.3). Memasuki tahun 2018, realisasi untuk pembangunan Kesra menurun lebih dari 50 persen dari Rp27.712.217 menjadi Rp18.646.530.

B.3. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Ekonomi di Desa Kajian

Aktivitas ekonomi tidak lepas dari kegiatan perekonomian yang ada di suatu wilayah. Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa kajian yaitu pembangunan pasar tradisional, peternakan sapi, sewa menyewa tenda. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa Desa Lubuk Ketepeng mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018, jenis kegiatan pembangunan ekonomi yang dibiayai dari Dana Desa yaitu antara lain pembangunan pasar. Sementara itu desa lainnya mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan ekonomi sejak dua tahun terakhir.



Gambar 3.4 Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Ekonomi di Desa Kajian Tahun 2015-2018

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SPeDe) Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2018 (diolah)

C. Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

C.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Selatan

Alokasi Dana Desa untuk bidang kesejahteraan dalam periode 2015-2017 cenderung berfluktuatif, hal ini disebabkan oleh prioritas penggunaan Dana Desa yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik (Tabel 3.3). Pada Tahun 2015 alokasi Dana Desa Rp124.159.989 meningkat menjadi Rp339.008.406 tahun 2016, akan tetapi menurun menjadi Rp2.896.841 (Tabel 3.3)

Tabel 3.3 Alokasi Dana Desa Untuk Bidang PembangunanKesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

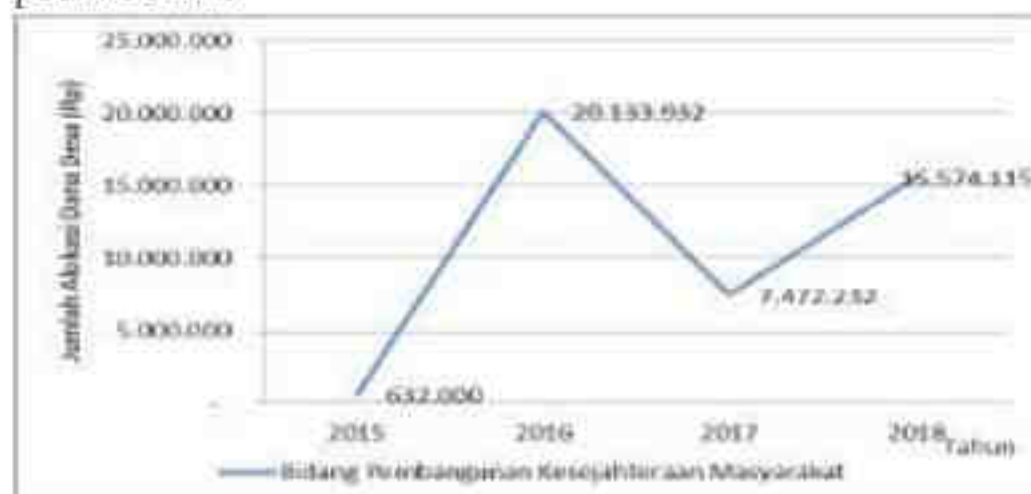
No	Jenis Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pembangunan Kesta	124.159.989	339.008.406	2.896.841	NA

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (diolah)

C.2. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Alokasi Dana Desa untuk pembangunan kejahteraan masyarakat cenderung mengalami fluktuasi, namun demikian

secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Pembangunan bidang kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dengan berbagai program kegiatan pelatihan sangat penting dalam meningkatkan *skill* masyarakat. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan anyaman dari bambu dengan memanfaatkan potensi lokal.



Gambar 3.5. Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Sosial Tahun 2015-2018

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (diolah)

Alokasi Dana Desa untuk menunjang bidang peningkatan kesejahteraan pada tahun 2015 sebesar Rp632.000 ribu dan meningkat menjadi Rp7.472.232 ribu pada tahun 2018 (Gambar 3.5).

C.3. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kajian

Kegiatan peningkatan kesejahteraan mendapat alokasi dana masih relatif kecil dengan rata-rata dana masih di bawah Rp 90 juta, Data lapang menunjukkan bahwa Desa Sedyo Mulyo dan Desa Muara Burnai II tidak mengalokasikan Dana Desa pada tahun 2017-2018. Sementara itu Desa Pulau Gemantung Darat dan Desa Tugu sejak tahun 2016 telah rutin mengalokasikan Dana Desa.



Gambar 3.6 Alokasi Dana Desa Menurut Bidang Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kajian

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (diolah)

D. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Sosial

D.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Sosial di Provinsi Sumatera Selatan

Alokasi Dana Desa untuk bidang sosial periode 2015-2017 juga mengikuti tren bidang pembangunan lainnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 93,92%. Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan juga dialokasikan untuk pembangunan pelayanan sosial dasar yang mencakup pembangunan Gedung PAUD, Polindes, Posyandu, Sumur, MCK, Seni dan Olahraga. Pembangunan sarana kesehatan, pendidikan dan fasilitas dasar lainnya menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Bidang pendidikan mengalami peningkatan alokasi Dana Desa terbesar, kemudian disusul oleh pembangunan MCK dan Sumur. Pemenuhan sarana dasar mutlak dilakukan agar kualitas hidup masyarakat meningkat. Tabel 3.4 menyatakan Dana Desa untuk MCK menjadi kegiatan utama pada tahun 2015 adalah Dana Desa sebesar Rp20.968,125. Meningkat lebih dari 100 persen pada tahun 2017, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp20.803.163. dana lainnya yang dialokasikan relatif besar adalah pembuatan sumur dan PAUD. Kedua kegiatan tersebut pada tahun 2015 mendapat porsi alokasi anggaran masing-masing Rp18.428.515 dan Rp19.954.974, dan meningkat tajam pada tahun 2017 masing-masing sebesar Rp44.914.235 dan Rp93.571.140 (Tabel 3.4)

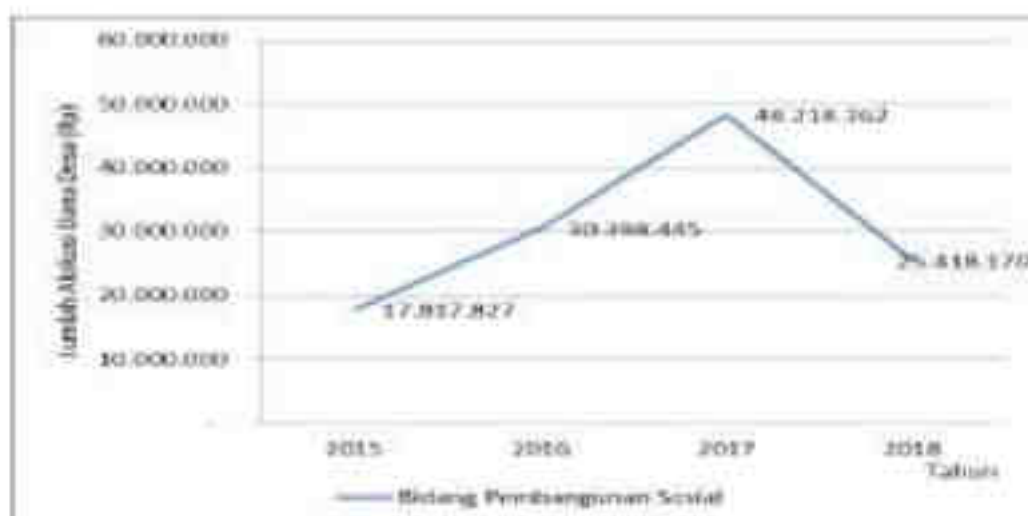
Tabel 3.4 Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

No	Jenis Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Air Bersih	3.745.127	15.812.852	17.153.737	8.921.971
2	MCK	20.968.125	23.988.129	46.357.257	20.803.163
3	Sumur	18.428.515	40.782.177	44.914.235	16.792.195
4	PAUD	19.954.974	70.060.059	93.571.140	16.664.684
5	Polindes	2.412.357	7.514.635	14.748.146	4.969.659
6	Posyandu	3.200.216	18.856.273	21.947.651	8.403.846
7	Raga Desa	2.428.899	15.091.744	37.172.320	44.061.450
Total Pembangunan Sosial		71.138.213	192.105.870	275.864.486	120.616.969

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018 (diolah)

D.2. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat merupakan amanat undang-undang. Alokasi Dana Desa untuk pembangunan gedung PAUD, Polindes, Posyandu, Perpustakaan, air bersih dan sumur di desa mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 alokasi Dana Desa sebesar Rp17817.827 ribu meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2018 (Gambar 3.5)

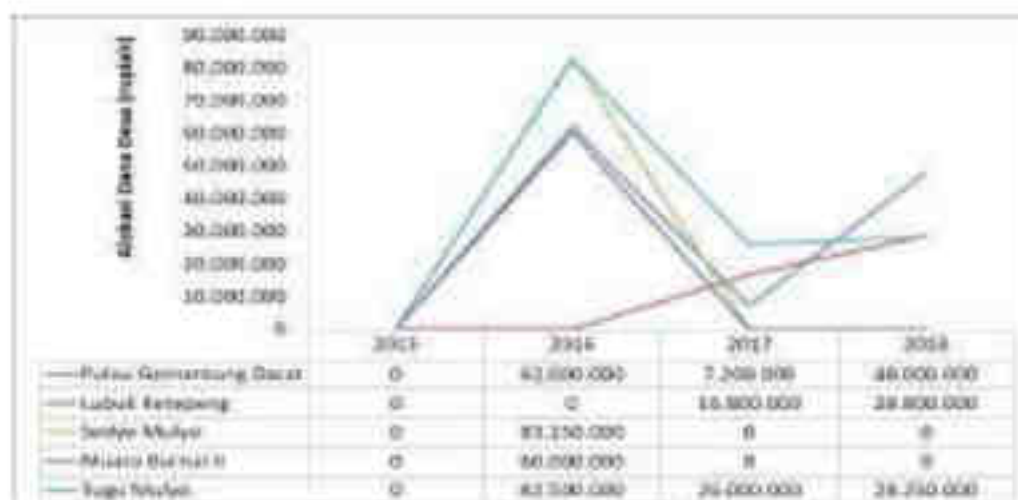


Gambar 3.5 Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Sosial tahun 2015-2018

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2018 (diolah)

D.3. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Sosial Dasar di Desa Kajian

Alokasi Dana Desa di kelima desa yang menjadi sampel menunjukkan Desa Pulau Gemantung Darat secara konsisten telah mengalokasikan Dana Desa untuk bidang pembangunan sosial dasar seperti Pembangunan pada Dana Desa Pulau Gemantung Darat yaitu Sumur Bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat terutama pada saat musim kemarau. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan sosial dasar di desa tersebut sangat berfluktuatif pada interval Rp7.200.000 sampai dengan Rp82.500.000. Sementara itu desa lainnya seperti Desa Sedyo Mulyo dan Desa Muara Burnai II mengalokasikan Dana Desa pada kegiatan Kesra hanya pada tahun 2016.



Gambar 3.6 Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Sosial Per Desa tahun 2015-2018

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2018 (diolah)

E. Kontribusi Dana Desa terhadap Peningkatan Status Desa

Hasil elaborasi data lapang menunjukkan secara umum terdapat perubahan pada status desa yang tercermin dari adanya peningkatan nilai IDM dan sub dimensi pembentuk IDM (indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan). Kontribusi Dana Desa terhadap perubahan status desa secara tidak langsung tercermin dari adanya perubahan perilaku masyarakat, perbaikan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan akses terhadap permukiman serta akses ke perdagangan (pasar).

Dalam penelitian ini kontribusi dana terhadap IDM disandingkan dengan kepuasan dan manfaat yang diperoleh

masyarakat terhadap kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Secara umum kepuasan respon terhadap prioritas pembangunan relatif cukup baik. Hasil survei terhadap masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap bidang pembangunan desa masih dominan terutama infrastruktur jalan. Menurut Fan dan Chan-Kang (2008) pembangunan fasilitas tertentu, misalnya jalan, meningkatkan kompetisi dan mengurangi keunggulan kompetitif sebagian produsen dalam suatu wilayah. Hasil data lapangan menunjukkan rata-rata responden di kelima desa yang dikaji menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air dianggap bermanfaat oleh lebih dari 96% responden dan sebanyak 89,8% merasa puas terhadap program infrastruktur yang telah dilakukan.

Tabel 3.5 Kepuasan dan Manfaat Dana Desa di Desa Kajian

Bidang	Kegiatan	Kepuasan (%)					Rata-rata	Manfaat (%)					Rata-rata
		PGD	LK	SM	MB	TM		PGD	LK	SM	MB	TM	
Bidang Pembangunan	Infrastruktur Jalan	96	96	100	97	70	90	100	100	100	100	90	96
	Sumber Daya Air	84	79	100	94	90	77	77	83	100	83	40	77
	Kualitas Labor	88	85	85	92	70	80	77	78	75	78	40	70
	Rata-rata	76	73	98	71	70	76	88	74	88	74	52	74
Bidang Ekonomi	Akses Sarana Produksi	43	18	75	28	78	45	50	18	80	50	92	54
	Menyediakan lapangan Karsaunter	53	18	85	43	53	55	55	48	83	57	85	61
	Akses Pasar	38	48	25	35	25	30	38	50	25	72	25	33
	BUMDesa	27	50	75	23	80	45	27	48	80	22	25	38
	Menyediakan Lembaga Ekonomi Lokal	73	38	85	17	53	44	77	73	85	17	20	60
	Rata-rata	38	48	60	38	63	30	55	48	71	38	47	48
Bidang Sosial	Kelembagaan Kelembagaan	100	79	100	85	80	88	93	83	100	95	83	83
	Bantuan dari Pihak Ketiga	92	73	100	88	88	90	82	83	100	75	75	84
	Kualitas Layanan Kesehatan	73	79	85	91	80	84	73	88	85	91	81	80
	Akses Pendidikan	88	83	75	87	83	79	77	88	75	96	85	80
	Rata-rata	83	81	93	83	85	85	81	88	93	93	78	84
Bidang Kearsa	Meningkatkan Kelembagaan	58	54	95	74	80	63	58	54	95	50	80	63
	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	58	67	85	30	53	51	58	75	85	35	80	54
	Meningkatkan Pendapatan	52	73	77	61	45	62	58	73	77	61	40	62
	Meningkatkan Kelembagaan Karsa	28	38	80	88	30	63	28	50	85	88	28	63
	Meningkatkan Kelembagaan	68	71	80	30	85	62	68	71	75	80	30	60
	Rata-rata	47	60	85	48	58	52	48	63	83	48	53	55

Sumber: Diolah dari data lapangan 2018

Keterangan: PGD = Pulau Gemantung Darat; LK = Lubuk Ketepeng ; SM = Sedyo Mulyo; MB = Muara Burnai II; TM = Tugumulyo

Hal serupa terjadi pula pada alokasi Dana Desa untuk pembangunan bidang sosial, adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 80% responden dan rata-rata merasa puas dengan kegiatan bidang sosial yang dibiayai dari Dana Desa. Namun demikian, diperlukan prioritas untuk bidang ekonomi dan bidang Kesra bagi desa-desa yang belum optimal pengalokasian Dana Desa sehingga kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan (Tabel 3.5).

Secara detail perubahan peningkatan nilai IDM menurut tipologi desa kajian adalah sebagai berikut:

1. Desa Pulau Gemantung Darat

Desa ini tidak mengalami perubahan status desa, pada tahun 2015 terkategori sangat tertinggal dan tetap tergolong sangat tertinggal. Namun demikian bila dilihat dari nilai IDM, desa tersebut mengalami peningkatan dari 0,4674 menjadi 0,5771. Sub dimensi IKS (sarana kesehatan) mengalami perubahan terutama pada sub dimensi akses ke pusat pelayanan kesehatan sedangkan sub dimensi sarana pendidikan terjadi perubahan yang lebih baik pada kegiatan PAUD, dan mulai tersedianya Paket Kegiatan Belajar dan Mengajar (Paket A, B, dan C). Selain itu, aspek modal sosial yang tergambar dari adanya kelompok olahraga turut memberikan sumbangan terhadap perubahan nilai IDM. Aspek permukiman menunjukkan adanya peningkatan dalam tersedianya akses yang lebih baik terhadap MCK dan tersedianya akses terhadap internet. Beberapa dimensi ketahanan ekonomi terlihat mengalami perubahan seperti keragaman produksi, dan mulai tumbuhnya kedai makanan.

Perubahan yang terjadi pada nilai IDM secara tidak langsung berkorelasi dengan adanya pembangunan fisik desa. Hasil survei terhadap rumah tangga (RT) menunjukkan sebesar 96% RT menyatakan puas terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan semua respon (100%) menyatakan bahwa pembangunan jalan sangat bermanfaat. Pembuatan jalan setapak yang bersumber dari Dana Desa berdampak berkurangnya waktu tempuh menuju sarana kesehatan.

Perubahan nilai IDM sub dimensi permukiman mampu mendorong peningkatan nilai IDM, hal ini dapat dipahami bahwa tersedia sarana MCK membawa dampak pada perubahan pola perilaku masyarakat, hasil ini ditunjukkan dari hasil temuan lapang yang menyatakan bahwa Dana Desa mampu memperbaiki perilaku masyarakat. Sebanyak 73% merasa puas dan 68% menyakini Dana Desa bermanfaat dalam mengubah perilaku masyarakat di desa survei. Fakta di lapangan juga mendeskripsikan, sebelum adanya pembuatan/pembangunan MCK masyarakat melakukan aktivitas di sungai dengan risiko mudah terserang sakit (akibat mengkonsumsi air sungai). Hasil temuan lapang mengungkapkan bahwa sebanyak 73% RT merasa puas terhadap pembangunan Pembangunan sarana MCK dan 64% menganggap fasilitas tersebut sangat bermanfaat.

Demikian juga pendirian PAUD sebagai wadah bermain anak-anak memberikan mafaat terhadap masyarakat yang selama ini harus mengantar anak bersekolah di desa tetangga. Artinya dapat dikatakan pembangunan desa dan sosial dasar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan PAUD,

sebanyak 68% RT menyatakan puas dan 73% menyatakan PAUD sangat bermanfaat.

Hasil temuan lapang tersebut secara garis besar memberikan simpulan walaupun alokasi Dana Desa belum mampu meningkatkan status desa namun telah mendorong peningkatan “nilai IDM” pada sub dimensi yang menjadi prioritas alokasi Dana Desa.

2. Desa Lubuk Ketepeng

Desa Lubuk Ketepeng mengalami perubahan status dari desa sangat tertinggal menjadi tertinggal. Perubahan nilai IDM terjadi pada aspek permukiman terutama tersedianya akses terhadap MCK. Ketersediaan sarana air untuk mandi dan mencuci mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Sengupta (2016), Tortajadaa (2014) infrastruktur air bersih sangat penting bagi perbaikan kualitas hidup manusia yang berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan desa. Hasil kajian terhadap rumah tangga penerima manfaat Dana Desa di Desa Lubuk Ketepeng menunjukkan sebesar 70% masyarakat merasa puas terhadap tersedianya MCK dan 100% menganggap pembangunan MCK sangat bermanfaat.

Selama ini penduduk menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari (MCK), pada saat kemarau desa ini kekurangan air bersih. Salah satu ciri daerah tertinggal adalah kurangnya akses terhadap fasilitas dasar (Mutu'ali, 2014). Pembuatan sumur bor mampu membantu warga masyarakat untuk tetap dapat mengakses air walaupun musim kemarau.

Selain itu, pembangunan jembatan tiang sebagai penghubung rumah penduduk yang ada di daerah rawa berdampak sangat besar terhadap *livelihood* masyarakat. Sebelum adanya jembatan tiang penduduk mengangkut hasil panen ke rumah menggunakan Sampan (perahu kecil tanpa mesin) sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama. Terbukanya akses jembatan telah mereduksi waktu perjalanan dan memperlancar arus barang dan jasa. Tingkat kepuasan RT terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 96% dan 100% menyatakan bahwa kegiatan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa sangat bermanfaat.

Aspek berikutnya adalah mulai berkembangnya warung di permukiman. Dana Desa yang diperuntukan untuk memperbaiki akses pasar dinilai masyarakat cukup bermanfaat (50%). Diketahui salah satu ciri dari masyarakat desa tertinggal dimana sebagian mereka melakukan transaksi dalam desa (perekonomian tertutup). Perbaikan akses jalan yang terlihat dari perbaikan jalan desa mendorong aktivitas warga masyarakat. Kontribusi nyata Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi masih belum terlihat optimal.

3. Desa Sedyo Mulyo

Desa Sedyo Mulyo merupakan desa yang belum mengalami perubahan status, desa ini masih tetap terkategori desa berkembang, akan tetapi nilai IDM mengalami peningkatan. Bila dilihat secara rinci per sub dimensi sebagian besar mengalami peningkatan. Pada dimensi ketahanan sosial sub dimensi sarana kesehatan, Dana Desa dialokasikan untuk

pengerasan jalan menuju sarana kesehatan berpengaruh secara tidak langsung pada berkurangnya waktu tempuh.

Tingkat kepuasan masyarakat dan terhadap pembangunan jalan sebesar 100% dan semua responden menyatakan pembangunan yang didanai dari Dana Desa tersebut sangat bermanfaat. Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat pembangunan tersebut mampu membuka akses menuju tempat pelayanan kesehatan. Sebelumnya masyarakat dihadapkan pada kondisi di mana pada saat musim hujan jalan sulit untuk dilewati kendaraan dan masyarakat terpaksa berjalan kaki. Hal ini dapat dimaknai bahwa perbaikan jalan telah menciptakan efisiensi waktu dan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

Sub dimensi berikutnya yang mengalami peningkatan adalah tersedianya akses air bersih dan air minum layak. Pembuatan sumur bor telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dana Desa melalui BUMDesa diperuntukkan untuk perpipaan sehingga air dapat mengalir ke rumah masyarakat. Kondisi ini sangat membantu masyarakat yang selama ini menggunakan sumur galian, pada saat kemarau selalu mengalami kekeringan. Studi ini menemukan sebanyak 100% merasa puas terhadap pembuatan sumur bor dan semua responden menganggap kegiatan tersebut sangat bermanfaat.

Aspek berikutnya yang mengalami perubahan yaitu kegiatan ekonomi yang lebih variatif dan terbukanya akses penduduk ke pusat perdagangan. Dengan demikian Dana Desa sangat berkontribusi terhadap peningkatan nilai IDM di Sedyo Mulyo. Perbaikan akses perdagangan ini dianggap sangat

bermanfaat oleh masyarakat (70%) namun sebaliknya tingkat kepuasan masyarakat masih relatif rendah yaitu sebesar 25%. Kondisi ini seharusnya menjadi pendorong bagi aparat desa untuk mengevaluasi peruntukan Dana Desa untuk kegiatan ekonomi.

4. Desa Muara Burnai II

Kontribusi Dana Desa terhadap perubahan status di Desa Muara Burnai dapat ditelusuri dari peningkatan indikator pembentuk IDM. Data menunjukkan semua dimensi menunjukkan peningkatan, perubahan dimensi ketahanan sosial ditopang oleh tersedianya akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, selain itu pada aspek modal sosial adanya ruang publik terbuka bagi masyarakat ikut memberi andil pada peningkatan status desa. Hasil survei terhadap masyarakat menunjukkan 91% merasa puas dengan program perbaikan akses jalan ke layanan kesehatan dan 85% merasa bermanfaat.

Indeks ketahanan ekonomi mengalami perubahan pada sub dimensi terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan mini market), adanya usaha kedai makan, restoran dan tersedianya lembaga ekonomi rakyat. Hasil survei menggambarkan sebanyak 70% responden merasa puas dan sebanyak 70% menganggap adanya perbaikan akses pasar bermanfaat.

Secara teoretis sektor jasa (warung dan mini market) akan mampu *men-derive* sektor lain untuk berkembang dengan kata lain sektor perdagangan mendorong sektor yang menyediakan *input* seperti sektor pertanian (padi, pisang, dan lainnya).

Selama ini petani mengalami kesulitan dalam memasarkan komoditas hasil pertanian dengan tersedianya pasar, petani dapat dengan mudah memasarkan hasil kebun yang dimiliki.

5. Desa Tugumulyo

Desa Tugumulyo mengalami perubahan status dari desa maju menjadi mandiri, perubahan status desa tidak lepas dari perbaikan sub dimensi. Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada mudahnya akses bagi masyarakat. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 70% responden merasa puas terhadap kegiatan infrastruktur terutama jalan dan sebanyak 80% menganggap pembangunan tersebut bermanfaat. Hal ini mengkonfirmasi pernyataan perangkat desa yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan desa telah mendorong mudahnya akses ke lahan pertanian, akibatnya ada penurunan biaya produksi bagi petani yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani.

Dimensi ketahanan sosial sub dimensi adanya perbaikan akses ke sarana kesehatan memiliki kontribusi terhadap meningkatnya nilai IDM. Temuan di lapangan menunjukkan alokasi Dana Desa yang digunakan untuk perbaikan akses jalan ke pelayanan kesehatan dianggap sangat bermanfaat (85%) dan responden yang menyatakan puas terhadap kegiatan tersebut sebanyak 80%.

F. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa

F.1. Faktor Pendorong

Keberhasilan Dana Desa tidak terlepas dari keberadaan faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil observasi lapangan diperoleh faktor internal sebagai pendorong dalam pemanfaatan Dana Desa yaitu tersedia potensi desa, setiap wilayah secara spasial memiliki keunggulan masing-masing. Potensi desa belum secara optimal dimanfaatkan, misalnya Desa Pulau Gemantung Darat memiliki potensi dalam pengembangan industri kecil keripik pisang, namun masih mengalami kesulitan dalam pemasaran.

Potensi daerah lainnya yaitu susu kerbau yang diolah menjadi Gula Puan, potensi tersebut memiliki prospek untuk dikembangkan karena di Desa Lubuk Ketepeng tersedia peternak kerbau yang relatif banyak jumlahnya. Akan tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan, hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan untuk menemukannya potensi daerah.

Faktor internal sebagai pendorong berikutnya adalah masih mengakarnya modal sosial di desa. Menurut Fatoni (2011) menyatakan bahwa keberhasilan program untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Modal sosial yang tercermin dalam sikap gotong royong, semakin tinggi tingkat gotong royong mengindikasikan tingginya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Selain itu, kelembagaan (institusi) desa yang sudah terbentuk menjadi

modal bagi desa untuk dapat dengan mudah memanfaatkan Dana Desa (Tabel 3.6)

Tabel 3.6. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa

Faktor	Pendorong	Penghambat
Faktor internal	1. Tersedia potensi desa 2. Masih mengakarnya modal sosial (<i>social capital</i>) berupa sikap gotong royong yang masih melekat 3. Aspek kelembagaan yang sudah terbentuk (aparatur desa) 4. Aspek pendanaan yang sudah tersedia yaitu melalui Dana Desa. 5. Aset yang dimiliki oleh desa.	1. Sumber daya manusia aparatur desa belum optimal. 2. Cakupan wilayah yang luas. 3. Persepsi masyarakat mengenai Dana Desa, sebagian masyarakat menganggap Dana Desa sebagai bantuan. 4. Keterlibatan masyarakat terhadap BUM Desa rendah. 5. Sulit menemukan potensi desa (<i>narrow minded</i>) tentang inovasi 6. Adanya <i>elite capture</i> dalam pemanfaatan Dana Desa.

Faktor	Pendorong	Penghambat
Faktor Eksternal	1. Tersedianya payung hukum berupa undang-undang dan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan Dana Desa di daerah 2. Adanya tenaga pendamping profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Pendamping Keteknisan)	1. Persaingan antar aktor ekonomi 2. Masih terbatasnya <i>net working</i> 3. Rendahnya komitmen pemerintah yang setengah hati dalam pengelolaan Dana Desa. 4. Jaringan internet yang belum baik.

Faktor pendorong lainnya adalah aset desa seperti tanah, gedung, dan kendaraan bila dioptimalkan akan mampu mendorong pemanfaatan Dana Desa, tersedianya tanah yang dapat digunakan untuk pendirian BUM Desa atau gedung yang dapat dimanfaatkan untuk operasional kegiatan BUM Desa.

Faktor eksternal yang mampu mendorong pemanfaatan Dana Desa adalah telah tersedianya peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menjadi pedoman dalam menentukan prioritas dan pengelolaan Dana Desa sehingga aparatur desa dapat dengan cepat mengalokasikan Dana Desa untuk bidang-bidang yang diprioritaskan. Pada tahap implementasinya pemerintah telah menyiapkan tenaga pendamping profesional dalam menentukan prioritas dan bagaimana pengelolaan Dana Desa.

F.2. Faktor Penghambat

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan arah pembangunan suatu daerah. Kreativitas untuk melakukan inovasi dimulai dari pengelolaan pengetahuan. Data hasil observasi dan wawancara dengan dengan berbagai tokoh masyarakat, pendamping profesional desa dan aparatur pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terungkap bahwa masalah utama dalam pemanfaatan Dana Desa adalah kualitas sumber daya manusia aparatur sangat berperan dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Faktor yang menjadi penghambat berikutnya dalam pemanfaatan Dana Desa yaitu cakupan wilayah desa yang luas. Hal ini berdampak pada sulitnya dalam melakukan implementasi program, setiap wilayah (Rukun Tetangga) menuntut persamaan bukan keadilan, akibatnya kegiatan yang dilakukan bukan berdasarkan prioritas namun pada keinginan warga. Sering dijumpai pembangunan yang dilakukan tidak tuntas. Keluhan terhadap cakupan wilayah tersebut menjadi permasalahan dalam implementasi Dana Desa.

Faktor penghambat berikutnya adalah persepsi keliru yang "membudaya" di kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap Dana Desa sebagai bantuan sehingga semua aset yang dibeli dari Dana Desa bisa dimanfaatkan secara gratis. Pengalaman beberapa desa yang menggunakan Dana Desa untuk sewa-menyewa tenda dan kursi atau penyewaan alat musik, mereka mengalami kesulitan untuk menarik uang sewa peralatan karena warga menganggap aset tersebut merupakan bantuan

pemerintah, padahal pihak pemerintah desa membutuhkan dana untuk pemeliharaan.

Meskipun semangat gotong royong relatif tinggi akan tetapi ketika diminta untuk menjadi pengurus BUMDesa tidak banyak warga desa yang bersedia karena pada awal pembentukan “insentif” dari BUMDesa tidak ada. Disamping itu, syarat pengurus BUMDesa tidak memperbolehkan aparatur desa sebagai pengurus BUMDesa pun ikut menjadi penghambat pemanfaatan Dana Desa untuk BUMDesa.

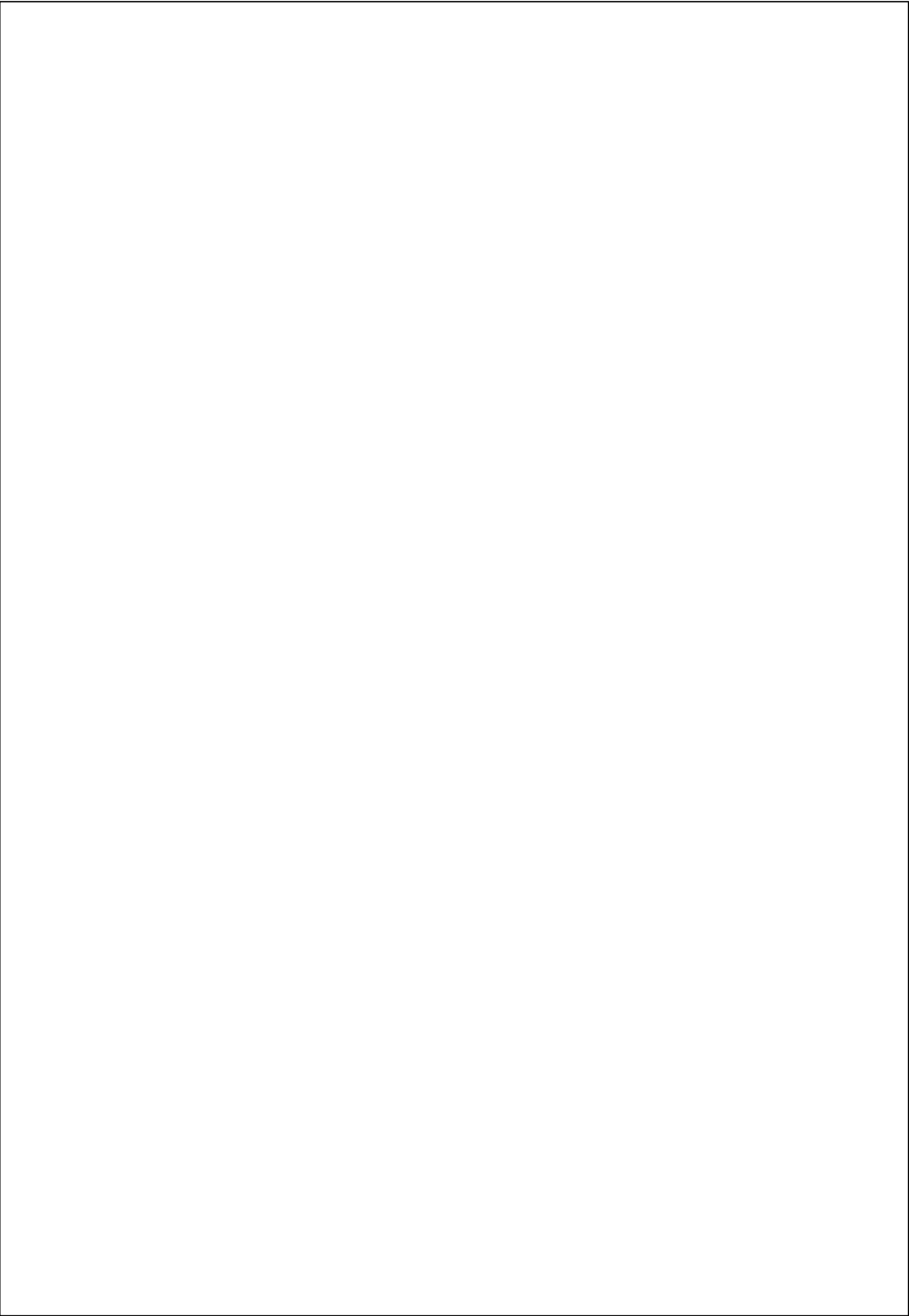
Sementara itu, hasil data lapang juga menemukan bahwa aparatur desa dan masyarakat masih sulit menemukan potensi yang akan dikembangkan sehingga pemanfaatan Dana Desa hanya sebatas menjalankan rutinas semata. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *elite capture* di desa, *elite capture* dimaknai segelintir orang yang mencoba mengambil keuntungan (*rent seeker*). Hal ini berdampak pada transparansi anggaran dan informasi satu arah, untuk itu langkah pemerintah yang mengharuskan pemerintah desa menginformasikan penggunaan Dana Desa dinilai tepat dalam mereduksi perilaku *elite capture*.

Selain faktor dari dalam, hambatan dalam pemanfaatan Dana Desa juga berasal dari luar. Beberapa faktor seperti persaingan antar aktor ekonomi, masih terbatasnya *net working* dan jaringan internet yang tidak baik. Persaingan antar aktor dalam merebut ceruk pasar di desa berdampak pada sulitnya aparatur desa untuk mengembangkan *core* bisnis yang akan dibiayai dari Dana Desa. Untuk bertanding dengan pemodal

besar, Dana Desa belum cukup kuat sehingga diperlukan strategi untuk dapat bersanding (bermitra) dengan beberapa desa.

Kerja sama dapat dilakukan antardesa dalam satu kecamatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik dan pembangunan, kemudian pada aras antar kecamatan dalam memperjuangkan kepentingan bersama antardesa yang berbatasan. Kerja sama dapat dilakukan melalui 1) pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya kawasan, 2) penguatan kapasitas lembaga ekonomi dan BUMDesa, 3) peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi desa (Kolopaking 2011).

Faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya jejaring ke pihak luar (investor), padahal salah satu syarat agar inovasi adalah jejaring yang kuat dan mampu berkolaborasi (Sulastri, 2018). Pemanfaatan Dana Desa harus efektif, efisien, komersial dan memiliki cipta nilai (*value added*). Selain jejaring, pemanfaatan Dana Desa memerlukan dukungan akses internet sebagai alat untuk membuka diri (transparansi anggaran). Ketidaktersediaan akses internet menjadi kelemahan mendasar di desa sangat tertinggal dan tertinggal sehingga akses informasi relatif sulit di akses.



IV

INOVASI DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA

A. Implementasi Inovasi Desa

Berdasarkan peruntukannya, Dana Desa dimanfaatkan sebagai program peningkatan inovasi pembangunan desa guna meningkatkan status desa. Hal tersebut tertuang dalam Kepmen Desa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Program peningkatan inovasi pembangunan desa tersebut berdampak pada beberapa aspek yaitu Pembangunan Desa, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Secara umum, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2.859 Desa yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota, yang dalam penelitian ini pengambilan sampel penelitian terpusat pada Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki 314 desa dengan cakupan seluruh kategori desa terpenuhi. Terdapat perbedaan mendasar pada penerapan inovasi pembangunan desa pada setiap tingkatan kategori desa. Guna merumuskan inovasi pembangunan desa secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan inovasi pembangunan desa dengan pemanfaatan

4 komponen teknologi yaitu *teknaware*, *humanware*, *infoware* dan *orgaware* sebagai tolok ukur.

- (1) *Technoware* merupakan perangkat analisis yang mencakup fasilitas fisik seperti komputer dan peralatan lainnya yang dapat membantu dalam menyelesaikan kegiatan penelitian ini dengan lebih mudah serta mengontrol jalannya kegiatan penelitian ini.
- (2) *Humanware* merupakan kemampuan individu dan kelompok (Tim Penelitian), seperti keterampilan, pengetahuan, keahlian dan kreativitas yang berperan untuk mewujudkan kegunaan sumber daya alam dan sumber daya teknologi yang tersedia untuk tujuan produktif.
- (3) *Orgaware* merupakan kemampuan suatu lembaga atau institusi yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan penelitian ini untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan seperti melakukan koordinasi pada jaringan kerja (group), *linkages*, dan teknik-teknik pengorganisasian.
- (4) *Infoware* merupakan kumpulan dokumen fakta seperti sekumpulan data, laporan, *blue print*, hasil survei, observasi dan pengamatan yang berfungsi untuk mempercepat proses kegiatan penelitian ini, sehingga menghemat sumberdaya dan waktu.

Selanjutnya dirumuskan matriks kondisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang dimiliki oleh masing-masing desa dalam menjalankan Program Inovasi Desa yang bersumber dari Dana Desa.

A.1. Implementasi Inovasi Desa di Pulau Gemantung Darat

Latar belakang inovasi di Desa Pulau Gemantung Darat didasarkan pada akses infrastruktur jalan yang masih buruk. Kelancaran transportasi untuk distribusi hasil panen sangat sulit dijangkau. Saat ini sudah dibangun jalan desa 866 meter dengan lebar 2,5 meter, pembangunan jalan tani sepanjang 780 meter dengan lebar 1 meter, dan jalan lingkungan 300 meter dengan lebar 2 meter. Pembangunan juga digunakan untuk jembatan dan PAUD pada tahun 2016. Dana Desa juga digunakan untuk pembelian tanah desa untuk kantor desa, pembangunan MCK (6 unit), sumur bor dan juga tedmond (5 Unit). Kemudian pembelian tenda dan kursi plastik untuk BUMDesa.

Tujuan inovasi yaitu memudahkan akses jalan ke dan di desa bagi masyarakat Desa Pulau Gemantung Darat. Kemudian untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di desa ini. Inovasi juga dilakukan untuk meningkatkan BUMDesa. Proses inovasi yang sudah diimplementasikan yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Penerimaan (akseptabilitas) dan partisipasi masyarakat merasa sangat terbantu dengan baiknya akses jalan saat ini sehingga mobilitas masyarakat menjadi terbantu. Kemudian adanya sumur bor membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih terutama ketika musim kemarau.

Kendala/tantangan dalam pelaksanaan Inovasi Desa adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan desa dan partisipasi yang lebih aktif, sehingga menciptakan SDM yang lebih baik. Hasil inovasi yang berdampak pada peningkatan status pembangunan desa yaitu mempermudah masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian dan akses lalu lintas dari dan ke Desa Pulau Gemantung Darat.

Beberapa keunggulan dari Inovasi Desa antara lain, yaitu:

- a. Keramahan Lingkungan: sungai menjadi terjaga dengan adanya jembatan dan jalan yang baik membuat desa menjadi lebih rapih dan bersih
- b. Penerapan Masyarakat: masyarakat membantu dalam menerapkan pembangunan infrastruktur desa
- c. Kemudahan, efisiensi biaya, waktu dan tenaga kerja: adanya jalan cor membuat akses kendaraan roda 4 menjadi mudah untuk memasuki desa dan menghemat waktu 30 menit dari desa ke jalan utama, sehingga pendistribusian menjadi lebih lancar dan hemat biaya operasional

Secara rinci pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa tertuang pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa Pulau
Gemantung Darat Kategori Desa Sangat Tertinggal**

Program Inovasi	Teknoware	Humanware	Infoware	Orgaware
Pembangunan Desa; Jalan Desa; Jembatan; Sumur Bor	Peralatan yang digunakan Manual	Menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur	Mampu menyediakan dan mengelola informasi umum	Oganisasi kecil, belum mengenal kerjasama, belum memiliki sistem manajemen yang baku
Pembangunan Ekonomi: BUMDesa Penyewaan Tenda	Peralatan untuk penggunaan khusus berupa tenda, terpal dan kursi	Disediakan perangkat BUMDesa sebagai pengelola	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data umum	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana
Pembangunan Sosial: Pembuatan MCK; Bantuan transportasi Posyandu; Pelatihan Siskeudes	Peralatan untuk penggunaan Umum	Mempu merawat	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data teknis	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana

Pembangunan Kesta:	Peralatan Manual	Mampu mengelola	Mampu menyediakan dan mengelola data umum dan teknis	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem manajemen yang sederhana
Pemberian tambahan insentif PAUD, Ustadz dan Ustadzah				

Sumber: Data Lapangan (diolah)

A.2. Implementasi Inovasi Desa di Desa Lubuk Ketepeng

Latar belakang Inovasi Desa di Desa Lubuk Ketepeng yaitu tersedianya lahan pertanian dan perkebunan karet. Pemanfaatan Dana Desa yaitu pembelian traktor sebanyak 6 unit. Selain itu, pembangunan sarana pendidikan berupa PAUD untuk anak-anak dan balita. Aktivitas ekonomi yang cukup tinggi memerlukan tempat pemasaran sehingga dibangun pasar tradisional. Pemerintah desa juga menyiapkan lahan yang dapat disewakan untuk acara pernikahan, hajatan dan acara lainnya. Inovasi lainnya adalah pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Inovasi yang telah berjalan saat ini dalam mendorong pembangunan: (1) pembangunan PAUD; (2) pembelian traktor; (3) penyewaan lahan. Tujuan inovasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempermudah akses bagi warga masyarakat. Proses inovasi melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dengan didampingi oleh tenaga profesional

pedamping desa (PLD, PD, TA). Akseptabilitas dan partisipasi masyarakat desa cukup tinggi terhadap pembangunan desa.

Kendala yang masih dihadapi saat ini adalah kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan traktor. Selain itu, stigma masyarakat yang menganggap bahwa Dana Desa yang bersumber dari negara, sehingga tidak seharusnya terdapat pemungutan sewa atas aset tersebut.

Keunggulan yang diperoleh dari Inovasi Desa yaitu dapat mudah diterapkan oleh masyarakat, dan inovasi yang dilakukan telah mempercepat waktu dalam membajak sawah sehingga produktivitas lahan meningkat. Inovasi juga mampu membuka peluang kesempatan kerja pada masyarakat seperti penyediaan tenaga untuk guru PAUD.

Secara rinci pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa tertuang pada Tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2 Pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa Lubuk Ketepeng
Kategori Desa Tertinggal**

Program Inovasi	Teknoware	Humanware	Infoware	Orgaware
Pembangunan Desa: Jalan; Jembatan; Sumur Bor	Peralatan yang digunakan Manual	Menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur	Mampu menyediakan dan mengelola informasi umum	Organisasi kecil, belum mengenal kerjasama, belum memiliki sistem manajemen yang baku
Pembangunan Ekonomi: Penyewaan Traktor; Penyewaan Lahan. BUM Desa penyewaan Tenda, dan pembibitan ikan lele	Telah memanfaatkan peralatan khusus	Disediakan perangkat BUMDesa sebagai pengelola	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data umum	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana
Pembangunan Sosial: Pembangunan MCK	Peralatan untuk penggunaan Umum	Mampu merawat	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data teknis	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana
Pembangunan Kesa: Pembangunan PAUD	Peralatan Manual	Mampu mengelola	Mampu menyediakan dan mengelola data umum dan teknis	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem manajemen yang sederhana

Sumber: Data Lapangan (diolah)

A.3. Implementasi Inovasi Desa di Desa Sedyo Mulyo

Proses Inovasi Desa di Desa Sedyo Mulyo dilatarbelakangi dengan adanya kemauan masyarakat untuk memperbaiki desa dan membangun desa agar bisa menjadi contoh bagi desa yang lain, terutama akses jalan yang selama ini menjadi poros perekonomian masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan jalan yang terkoordinir dan baik.

Pelaksanaan Inovasi Desa diimplementasikan dalam kegiatan pengerasan jalan tanah dengan batu. Hal tersebut memperlancar aktivitas perekonomian untuk distribusi hasil panen sawit masyarakat. Pembangunan fasilitas sekolah dasar dilakukan dengan gotong untuk membangun 5 ruang kelas SD. Desa juga sangat memperhatikan tata ruang desa dengan pembangunan fasilitas ruang publik, partisipasi pembangunan desa melalui musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat dan mengajak mereka untuk bergotong royong dalam membangun infrastruktur desa, kemudian mengajak mereka untuk melakukan dan menerapkan tata ruang desa yang baik. Secara rinci pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa tertuang pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa Sedyo Mulyo
Kategori Desa Berkembang

Program Inovasi	Teknoware	Humanware	Infoware	Orgaware
Pembangunan Desa: Jalan Desa; Pembatas Jalan;	Peralatan yang digunakan Khusus	Menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur	Mampu menyediakan dan mengelola informasi umum	Organisasi kecil, belum mengenal kerjasama, belum memiliki sistem manajemen yang baku
Pembangunan Ekonomi: BUM Desa Pengadaan Air Bersih Siap Minum	Peralatan untuk penggunaan khusus	Disediakan perangkat BUMDesa sebagai pengelola	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data umum	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana
Pembangunan Sosial: Pembuatan MCK	Peralatan untuk penggunaan Umum	Mampu merawat	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data teknis	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana

Sumber: Data Lapangan (diolah)

A.4. Implementasi Inovasi Desa di Desa Muara Burnai II

Latar belakang Inovasi Desa diawali dengan kondisi beberapa ruas jalan desa yang masih kurang baik sehingga sebagian besar dialokasikan untuk perbaikan jalan desa. Selain itu, adanya kebiasaan masyarakat lokal mengadakan hajatan/pesta sering menghadirkan pertunjukan musik berupa organ tunggal, hal tersebut mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa

mengalokasikan dana untuk pembelian organ tunggal yang nantinya dapat disewakan pada masyarakat.

Proses inovasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal, perangkat desa beserta masyarakat melakukan identifikasi potensi yang dikembangkan, melalui musyawarah akhirnya diputuskan untuk fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta bidang sosial (penyewaan alat musik). Inovasi yang telah dilakukan sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat antusias sangat tinggi, dan sangat mendukung adanya Inovasi Desa melalui penyewaan organ tunggal.

Kendala yang dihadapi: 1) sikap masyarakat yang masih menganggap bahwa Dana Desa merupakan bantuan pemerintah seperti halnya Inpres Desa Tertinggal sehingga sangat sulit untuk menarik sewa peralatan. 2) masih terbatasnya pengetahuan mengenai inovasi, inovasi yang dilakukan cenderung pada motif ekonomi.

Peningkatan status desa dari desa tertinggal ke desa maju didorong adanya perbaikan sarana fisik (jalan, jembatan). Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Inovasi yang dilakukan sangat relatif mudah diterapkan di masyarakat. Inovasi yang dilakukan telah membuka akses bagi masyarakat dan menghemat biaya penyewaan alat. Secara rinci pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa tertuang pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4 Pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa Muara Burnai II
Kategori Desa Maju

Program Inovasi	Teknoware	Humanware	Infoware	Orgaware
Pembangunan Desa: Jalan Desa; Jembatan	Peralatan yang digunakan Manual	Menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur	Mampu menyediakan dan mengelola informasi umum	Organisasi kecil, belum mengenal kerjasama, belum memiliki sistem manajemen yang baku
Pembangunan Ekonomi: BUMDesa Penyewaan Organ Tunggal	Peralatan untuk penggunaan khusus	Disediakan perangkat BUMDesa sebagai pengelola	Mampu menyediakan dan mengelola sistem informasi data umum	Organisasi mulai menjalin kerjasama dan memiliki sistem yang sederhana

Sumber: Data Lapangan (diolah)

A.5. Implementasi Inovasi Desa di Desa Tugumulyo

Adanya potensi seperti kekayaan alam, sumber daya manusia, daya beli masyarakat dan keperdulian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Faktor tersebut mendorong adanya Inovasi Desa dengan didirikannya lembaga ekonomi (BUMDesa). Sumber daya alam (pakan ternak) dan ketersediaan SDM yang mampu digerakan untuk memelihara ternak (sapi) mendorong inovasi bidang peternakan dengan sistem bagi hasil (sapi yang beranak dibagi dengan sistem 1:1, bila sapi memiliki anak satu maka dikonversikan ke dalam bentuk rupiah).

Faktor kedua adalah tingginya permintaan masyarakat akan untuk mendirikan bangunan (Ruko) dan adanya proyek infrastruktur (jalan desa) mendorong pembelian Molen yang disewakan untuk masyarakat. Terakhir, tahun 2017 terjadi wabah demam berdarah sementara penanganan terhadap korban sangat lambat, untuk mengatasinya pemerintah desa membeli alat fogging yang dapat digunakan masyarakat sehingga endemi demam berdarah dapat diatasi.

Ada tiga inovasi yang telah dikembangkan yaitu: ternak sapi, molen, dan fogging. Ke depan pemerintah desa merencanakan renovasi gedung serba guna sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk acara hajatan, manasik haji sehingga dapat meningkatkan PADes. Rencana pengembangan BUMDesa berikutnya adalah penyediaan mobil pengangkut sampah. Tujuan inovasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempermudah akses bagi warga masyarakat. Proses inovasi yang dilakukan tidak luput dari kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal, perangkat desa beserta masyarakat melakukan identifikasi potensi yang dikembangkan, melalui musyawarah akhirnya diputuskan untuk fokus pada pembangunan (pembelian mesin molen), pemberantasan epedemi demam berdarah.

Akseptabilitas dan partisipasi masyarakat desa cenderung bersikap acuh, hal ini dapat dipahami bahwa karakteristik desa yang sudah mencirikan kota. Sebagian besar penduduk hidup dari sektor jasa hal ini berdampak pola perilaku masyarakat di desa. Kendala yang dihadapi dalam Inovasi Desa yaitu SDM yang masih belum memiliki keahlian yang optimal.

Inovasi Desa yang ada relatif belum berperan dalam peningkatan status, akan tetapi Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik (jalan, gorong, jembatan) secara langsung mampu mendorong aktivitas masyarakat sehingga kegiatan ekonomi semakin lebih baik. Keramahan lingkungan diaplikasikan pada ketiga Inovasi Desa tersebut.

Inovasi yang dilakukan sangat relatif mudah diterapkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi yang dilakukan telah mempercepat waktu dalam membajak pengerjaan bangunan sehingga menghemat biaya. Inovasi juga bermanfaat bagi sanitasi lingkungan serta adanya tambahan penghasilan bagi masyarakat. Secara rinci pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa tertuang pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5 Pemanfaatan Komponen Teknologi Inovasi Desa Tugumulyo
Kategori Desa Maju

Program Inovasi	Teknoware	Humanware	Infoware	Orgaware
Pembangunan Desa: Jalan Desa; Jembatan; Pembangunan Saluran Air	Peralatan yang digunakan Manual	Menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur	Mampu menyediakan dan mengelola informasi umum	Organisasi kecil, belum mengenal kerja sama, belum memiliki sistem manajemen yang baku

Pembangunan Ekonomi: BUMDesa Penggemukan Sapi;	Peralatan untuk penggunaan khusus berupa	Disediakan perangkat BUMDesa sebagai	Mampu menyediakan dan mengelola	Organisasi mulai menjalin kerja sama dan memiliki sistem
Penyewaan Molen; Penyewaan Fogging	tenda, terpal dan kursi	pengelola	sistem informasi data umum	yang sederhana

Sumber: Data Lapangan (diolah)

B. Kebutuhan Inovasi Desa

B.1. Kebutuhan Inovasi Desa Pulau Gemantung Darat

Berdasarkan hasil survei tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan Inovasi Desa. Maka diperlukan rumusan kebutuhan Inovasi Desa dengan menggunakan matriks posisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada desa tersebut. Selanjutnya memberikan asumsi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai kebijakan Inovasi Desa.

Tabel 4.6 Asumsi Strategi Potensi Desa Dalam Pemenuhan Kebutuhan Inovasi di Desa Pulau Gemantung Darat

Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
	1.Akses Perlintasan Antar Desa	1.Potensi Desa belum teridentifikasi 2.Angka kemiskinan penduduk sangat tinggi
Internal		
Kekuatan (S)	S-O	S-T
1.Potensi SDA Desa sangat tersedia 2.Sikap gotong royong warga Desa	1.Pemerintah dan masyarakat desa dapat memanfaatkan akses perlintasan antar desa sebagai pusat ekonomi lokal. 2.Masyarakat desa dapat bersama-sama membangun dan memelihara akses jalan dan jembatan antar desa.	1.Pemerintah harus melakukan pemetaan potensi desa. Hal tersebut dapat dijadikan <i>masterplan</i> pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki status ekonomi masyarakat. 2.Masyarakat desa dapat membangun pusat ekonomi lokal dan memperkenalkan potensi lokal dengan pembangunan pasar tradisional.
Kelemahan (W)	W-O	W-T
1.Akses menuju pusat kecamatan yang jauh	1.Memperbaiki infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi menuju kecamatan	1.Membuat rancangan strategis tentang kemandirian ekonomi lokal.

2.Akses menuju desa sangat sulit	2.Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	2.Pemantapan BUM Desa yang mampu menampung sumber daya lokal untuk dipasarkan keluar wilayah desa.
3.Kualitas SDM yang sangat minim	3.Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur desa	3.Pemerintah Desa merumuskan strategi pembangunan ekonomi, dan peluang bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4.Persepsi masyarakat tentang Dana Desa	4.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting BUM Desa sebagai potensi pendapatan desa	4.Membuat pelatihan tentang potensi desa.
		5.Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan BUM Desa sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa

Sumber: Data Lapangan (diolah)

B.2. Kebutuhan Inovasi Desa Lubuk Ketepeng

Berdasarkan hasil survei tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan Inovasi Desa. Maka diperlukan rumusan kebutuhan Inovasi Desa dengan menggunakan matriks posisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada desa tersebut. Selanjutnya memberikan asumsi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai kebijakan Inovasi Desa.

Tabel 4.7 Asumsi Strategi Potensi Desa Dalam Pemenuhan Kebutuhan Inovasi di Desa Lubuk Ketepeng

Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Internal	1. Jarak desa ke Ibukota Provinsi 43km atau waktu tempuh 1,5jam	1. Potensi Desa belum optimal 2. Angka kemiskinan penduduk sangat tinggi
Kekuatan (S)	S-O	S-T
1. Potensi SDA Desa berupa persawahan dan perikanan sungai 2. Sikap gotong royong warga Desa 3. Kesadaran masyarakat tentang pendidikan usia dini	1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk distribusi produk lokal ke Ibukota. 2. Mengadakan akses transportasi dari dan ke pusat perekonomian bagi masyarakat desa	1. Pemerintah harus melakukan prioritas potensi desa yang memiliki nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

	3. Membuat standar kualitas yang mampu bersaing untuk produk lokal yang dipasarkan 4. Pemberdayaan masyarakat tentang kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur desa untuk memperlancar akses menuju pusat ekonomi wilayah 5. Melakukan pelatihan tentang pengelolaan PAUD dan bimbingan bagi tenaga pengajar PAUD dari instansi pemerintah daerah	3. Membangun BUM Desa yang menjadi penampung produk lokal untuk dipasarkan ke pasar-pasar Ibukota. 4. Melibatkan masyarakat untuk pengelolaan BUM Desa 5. Memberikan kurikulum kesadaran pada anak tentang potensi desa. Bagaimana cara memelihara dan merawat lingkungan dengan baik
Kelemahan (W)	W-O	W-T
1. Akses jalan menuju desa relatif sulit. 2. Belum memiliki sarana transportasi umum 3. Kualitas SDM yang sangat minim 4. Persepsi masyarakat tentang Dana Desa	1. Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2. Perlunya membangun transportasi umum desa khususnya untuk distribusi produk lokal ke pasar Ibukota	1. Mendirikan BUMDesa yang mampu menampung sumber daya lokal untuk dipasarkan keluar wilayah desa. 2. Membuat BUM Desa Transportasi Umum

	3. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur desa 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting BUMDesa sebagai potensi pendapatan desa	3. Pemerintah Desa merumuskan strategi pembangunan ekonomi, dan peluang bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Membuat pelatihan tentang potensi desa. 5. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan BUMDesa sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
--	--	--

Sumber: Data Lapangan (diolah)

B.3. Kebutuhan Inovasi Desa Sedyo Mulyo

Berdasarkan hasil survei tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan Inovasi Desa. Maka diperlukan rumusan kebutuhan Inovasi Desa dengan menggunakan matriks posisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada desa tersebut. Selanjutnya memberikan asumsi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai kebijakan Inovasi Desa.

Tabel 4.8 Asumsi Strategi Potensi Desa dalam Pemenuhan Kebutuhan Inovasi di Desa Sedyo Mulyo

	Peluang (O)	Ancaman (T)
	- Berpotensi Menjadi Desa Wisata dan Percontohan dengan Tata Ruang yang Sangat Baik. - Pengelolaan perkebunan sawit warga sangat baik	- Pengembangan Potensi Desa belum optimal - Harga Sawit yang berfluktuatif
Internal		
Kekuatan (S)	S-O	S-T
- Potensi SDA Desa berupa perkebunan sawit - Kepedulian masyarakat desa terhadap pembangunan - Peningkatan sarana dan prasarana ruang publik	- Membangun BUM Desa mengenai potensi desa baik dalam bidang distribusi hasil perkebunan, dan wisata desa - Melibatkan peran aktif masyarakat di setiap program Inovasi Desa. - Membangun BUM Desa untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang produktif.	- Membuat pemetaan potensi desa selain bidang perkebunan - Mengoptimalkan koperasi desa atau BUMDesa dalam pengelolaan potensi SDA lokal - Mempromosikan informasi Desa Sedyo Mulyo secara digital untuk mengundang investor
Kelemahan (W)	W-O	W-T

1. Akses jalan menuju desa relatif sulit.	1. Memberikan informasi pada pendatang tentang Desa Sedyo Mulyo, agar mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah	1. Melakukan kerja sama dengan perusahaan terkait untuk membangun pabrik pengolahan sawit di Desa Sedyo Mulyo
2. Belum memiliki sarana transportasi umum	2. Membuat usaha di bidang transportasi khususnya untuk distribusi produk dan transportasi pendatang	2. Membuat usaha di bidang transportasi khususnya untuk distribusi produk dan transportasi pendatang
3. Ketergantungan masyarakat pada komoditas sawit	3. Pemetaan potensi SDA lokal lain sebagai alternatif mata pencarian masyarakat	3. Merumuskan potensi SDA lokal lainnya
4. Fasilitas Kesehatan belum memadai	4. Memprioritaskan program desa untuk pembangunan fasilitas kesehatan	4. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat

Sumber: Data Lapangan (diolah)

B.4. Kebutuhan Inovasi Desa Muara Burnai II

Berdasarkan hasil survei tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan Inovasi Desa. Maka diperlukan rumusan kebutuhan Inovasi Desa dengan menggunakan matriks posisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada desa tersebut. Selanjutnya memberikan asumsi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai kebijakan Inovasi Desa.

Tabel 4.9 Asumsi Strategi Potensi Desa Dalam Pemenuhan Kebutuhan Inovasi di Desa Muara Burnai II

Eksternal		Peluang (O)	Ancaman (T)
Internal		1. Wilayah Desa yang strategis	1. Potensi Desa belum optimal 2. Masih ada penduduk dengan kategori miskin 3. Rawan konflik masyarakat
Kekuatan (S)		S-O	S-T
1. Potensi SDA Desa berupa karet dan sawit 2. Budaya masyarakat yang sering bersilaturahmi dan membuat hajatan		1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk distribusi produk lokal ke pasar di daerah Tugumulyo 2. Membuat standar kualitas yang mampu bersaing untuk produk lokal yang dipasarkan 3. Memanfaatkan BUM-Des dan mengembangkan kualitas SDM dan fasilitas yang diberikan	1. Pemerintah harus melakukan prioritas potensi desa yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan yang produktif
Kelemahan (W)		W-O	W-T
1. Luasnya wilayah desa 2. Belum memiliki sarana transportasi umum		1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung antar dusun.	1. Membuat pemetaan potensi desa, dan pemetaan sosial.

3. Kualitas SDM masih belum optimal	2. Membangun moda transportasi umum bagi masyarakat	2. Mengorganisir masyarakat untuk berperan aktif terhadap kelancaran aktivitas masyarakat
4. Persepsi masyarakat tentang Dana Desa	3. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat tentang potensi desa berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat di desa.	3. Pemerintah Desa merumuskan strategi pembangunan ekonomi, dan peluang bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membuat pelatihan tentang potensi desa.
	4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting BUMDes sebagai potensi pendapatan desa.	4. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan BUMDes sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa

Sumber: Data Lapangan (diolah)

B.5. Kebutuhan Inovasi Desa Tugumulyo

Kebutuhan Inovasi Desa Tugumulyo disusun berdasarkan matriks posisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada desa untuk keperluan menyusun strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai kebijakan Inovasi Desa sebagai berikut;

Tabel 4.10 Asumsi Strategi Potensi Desa Dalam Pemenuhan Kebutuhan Inovasi di Desa Tugumulyo

Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Internal	1. Posisi Desa strategis dan berbatasan dengan Provinsi lain 2. Pusat perdagangan untuk beberapa kecamatan di sekitar 3. Wilayah yang luas dan Penduduk yang multi etnis	1. Latar belakang suku dan budaya penduduk, menimbulkan potensi konflik 2. Masih ada masyarakat berada di garis kemiskinan 3. Dominasi produk luar di pasar
Kekuatan (S)	S-O	S-T
1. Potensi SDA Desa berupa perkebunan sawit dan karet, peternakan sapi 2. Fasilitas Teknologi dan Informasi sudah baik 3. Akses menuju desa sangat baik	1. Membuka peluang investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan 2. Mengelola peternakan sapi sebagai salah satu BUMDes 3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan sarana pendidikan tinggi 4. Membangun tempat rekreasi	1. Pendataan basis penduduk di setiap wilayah desa 2. Mengembangkan sarana informasi terkait informasi tentang potensi desa dan pengembangan SDM 3. Membuat perkampungan bercirikan karakteristik budaya masyarakat yang beragam
Kelemahan (W)	W-O	W-T
1. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan lingkungan masih	1. Membangun tempat-tempat sampah, dan memberikan sosialisasi tentang	1. Mendirikan BUMDes untuk pengelolaan sampah dan kebersihan

rendah	kebersihan lingkungan	pasar dan tempat umum lainnya.
2. Keterbatasan anggaran desa untuk pengembangan pelosok desa	2. Pembuatan pemetaan prioritas pembangunan desa	2. Memprioritaskan fasilitas keagamaan untuk memfasilitas kepentingan masyarakat.
3. Inovasi pengembangan produk lokal belum optimal	3. Memberikan pelatihan dan membentuk BUMDes yang menangani potensi produk lokal, seperti hasil pertanian dan olahan perkebunan dan peternakan	3. Pemerintah Desa merumuskan strategi pembangunan ekonomi, dan peluang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		4. Membuat pelatihan tentang potensi desa.

Sumber: Data Lapangan (diolah)

V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perubahan status desa di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun secara umum menunjukkan 1) adanya penurunan desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal, 2) adanya kenaikan desa berstatus berkembang, maju dan mandiri. Desa dengan status sangat tertinggal sampai tahun 2018 tersisa 180 desa sedangkan desa dengan status tertinggal sebanyak 350 Desa. Desa dengan status berkembang meningkat menjadi 981desa, desa berstatus maju sebanyak 51 desa, dan desa mandirisebanyak 1 desa.

Perkembangan status desa di tingkat Kabupaten OKI menunjukkan hal serupa, pada tahun 2018 desa dengan status sangat tertinggal tersisa 23 desa, desa tertinggal turun menjadi 173 desa. Di samping itu, desa status berkembang mengalami peningkatan menjadi 107 desa, desa maju menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari 1 desa menjadi 10 desa, dan 1 desa mandiri.

Alokasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan masih cenderung digunakan untuk pembangunan infrastruktur selama 2015-2018 yaitu rata-rata sebesar 73,46%, bidang pembangunan sosial rata-rata sebesar 16,24%, pembangunan ekonomi sebesar

5,45% dan bidang kesejahteraan rata-rata sebesar 4,85%, tren yang sama terjadi juga di Kabupaten OKI.

Kontribusi Dana Desa terhadap peningkatan status desa secara jelas terlihat dari alokasi dana pada program-program peningkatan IDM. Sebagian besar responden menyatakan kepuasan yang tinggi pada aspek pembangunan infrastruktur dan sosial yang cenderung mendorong peningkatan IDM dengan tingkat kepuasan di atas 80%.

Faktor yang mendorong pemanfaatan Dana Desa yaitu tersedia aturan sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan Dana Desa, tersedianya tenaga pendamping desa, tersedianya potensi daerah dan masih kuatnya modal sosial yang melekat di masyarakat. Sementara faktor penghambat yaitu terbatasnya SDM aparatur desa, sumber daya manusia aparatur desa belum optimal, cakupan wilayah yang luas, persepsi masyarakat mengenai Dana Desa dan keterlibatan masyarakat terhadap BUMDesa rendah.

Desa masih sulit menemukan potensi desa sehingga Inovasi Desa relatif belum berjalan dengan baik. Kunci utama dalam melakukan inovasi adalah pengelolaan pengetahuan yang dimulai dari proses identifikasi sumber-sumber potensi untuk dikembangkan.

B. Saran

1. Pemerintah pusat perlu memperhatikan aspek spasial dalam menentukan indikator status desa, tidak semua desa harus

memiliki Gedung Sekolah SMP dan SMA sebagai salah poin sub dimensi IDM.

2. Pemerintah pusat, pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan, desa) harus berkoordinasi dalam hal menentukan status desa.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan Dana Desa.
4. Pemerintah desa hendaknya melakukan kerja sama antar desa, perguruan tinggi, LSM dan Profesional untuk meningkatkan Inovasi Desa.
5. Pemerintah melakukan revisi aturan pengurus BUMDesa terutama tingkatan pendidikan pengurus BUMDesa karena desa kesulitan mencari pengurus BUMDesa.

Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan penyusunan data dan informasi tentang manfaat Dana Desa yang telah dilaksanakan memberikan gambaran tentang kondisi desa secara riil. Provinsi Sumatera Selatan saat ini memiliki 2.852 desa dan akan terus bertambah seiring dengan pemekaran desa di beberapa wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi satu-satunya Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki desa-desa dengan kategori status dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri. Kabupaten OKI memiliki 314 desa yang telah memanfaatkan Dana Desa dalam Anggaran Pembangunan Desa sejak tahun 2015 hingga 2018. Dana Desa telah memberikan dampak positif bagi perkembangan desa di Kabupaten OKI. Hal tersebut terbukti dengan penurunan jumlah desa sangat tertinggal dari tahun 2015-2018 sebesar 37,93%, dan desa tertinggal menurun sebesar 17,69%. Peningkatan status desa menjadi desa berkembang sebesar 77,4% dan desa maju sebesar 168,42%, serta menghasilkan 1 desa mandiri.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Dana Desa diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan tidak jauh melebihi. Untuk itu, diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada, seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan desa mandiri. Secara umum, tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan atau program inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Dana Desa, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

ISBN 978-623-7327-40-0



Buku Manfaat Dana Desa

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ www.bpkp.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%